



LAPORAN KEUANGAN 2025

**DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- b. Laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran
 - 2) Neraca.
 - 3) Laporan Operasional.
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
 - 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Terkait hal tersebut diatas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya :
 - 1) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
 - 2) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
 - 3) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
 - 4) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 5) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

- 6) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
- 7) Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.
- 8) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Berdasarkan laporan ini, realisasi **Pendapatan dan Hibah** untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp.238.536.000.00** dari target Pendapatan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA TA 2025 sebesar **Rp.280.000.000.00** , atau **85,19 %** Sementara itu, realisasi **Belanja Operasi** (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial) **Rp.28.064.320.276.00** atau **95,46 %** dari pagu yang dianggarkan sebesar **29.396.286.653,00** sedangkan realisasi **Belanja Modal** adalah sebesar **Rp.309.673.020.00** atau **98,33 %** dari pagu Belanja yang dianggarkan dalam DPA TA 2025 sebesar **Rp.314.918.300,00**.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar **Rp. 132.465.803.714,32** dan Kewajiban sebesar **(Rp. 100.220.595,00)** sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 132.465.803.714,32**.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Kami menyadari bahwa laporan keuangan tahunan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jambi, Januari 2026

KEPALA DINAS,

H. IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19710510 199703 1 008

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI**

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (LO), (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direview oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Januari 2026

KEPALA DINAS,

H. IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19710510 199703 1 008



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025
1 JANUARI 2025 – 31 DESEMBER 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	59.994.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
5	BELANJA DAERAH	29.711.204.953,00	28.373.993.296,00	95,49	29.508.213.922,50
5.1	BELANJA OPERASI	29.396.286.653,00	28.064.320.276,00	95,46	29.508.213.922,50
5.1.01	Belanja Pegawai	14.602.862.888,00	13.825.712.980,00	94,67	14.491.760.629,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.890.885.902,00	7.314.366.041,00	92,69	7.529.639.802,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.646.448.136,00	5.573.585.900,00	98,70	5.740.774.550,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	501.999.988,00	459.757.782,00	91,58	482.350.690,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	365.999.998,00	332.299.000,00	90,79	338.015.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	103.999.994,00	46.809.000,00	45,00	42.780.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	201.999.994,00	153.870.000,00	76,17	158.705.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	291.999.988,00	259.770.540,00	88,96	266.215.920,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	47.503.721,00	14.826.968,00	31,21	17.783.526,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	547.635,00	73.017,00	13,33	74.657,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	583.165.210,00	427.480.440,00	73,30	435.876.154,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	24.000.000,00	11.473.316,00	47,80	11.772.184,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	48.000.000,00	34.420.078,00	71,70	35.292.121,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	75.221.238,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.711.976.986,00	6.511.346.939,00	97,01	6.574.040.827,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.225.364.986,00	3.179.133.564,00	98,56	3.159.192.224,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	96.200.000,00	90.544.374,00	94,12	72.230.717,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.360.412.000,00	3.241.669.001,00	96,46	3.342.617.886,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	388.080.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	388.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.316.343.765,00	11.814.680.866,00	95,92	14.516.453.293,50
5.1.02.01	Belanja Barang	3.706.954.169,00	3.522.583.320,00	95,02	4.226.052.666,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.705.588.323,00	3.521.293.430,00	95,02	4.226.052.666,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.365.846,00	1.289.890,00	94,43	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.140.838.061,00	5.880.842.081,00	95,76	6.718.836.198,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.356.096.341,00	5.261.780.223,00	98,23	5.871.128.330,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	570.150.000,00	558.470.728,00	97,95	813.875.660,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	64.591.720,00	60.591.130,00	93,80	33.832.208,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	499.108.510,00	496.580.328,00	99,49	561.212.386,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	236.502.300,00	234.762.570,00	99,26	553.819.786,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	262.606.210,00	261.817.758,00	99,69	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.392.600,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.419.374.025,00	1.375.464.375,00	96,90	2.614.784.018,50
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.419.374.025,00	1.375.464.375,00	96,90	2.614.784.018,50
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	550.069.000,00	539.210.762,00	98,02	395.568.025,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	477.569.000,00	474.714.762,00	99,40	363.582.025,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	72.500.000,00	64.496.000,00	88,96	31.986.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.477.080.000,00	2.423.926.430,00	97,85	500.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.477.080.000,00	2.423.926.430,00	97,85	500.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.477.080.000,00	2.423.926.430,00	97,85	500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	29.396.286.653,00	28.064.320.276,00	95,46	29.508.213.922,50
5.2	BELANJA MODAL	314.918.300,00	309.673.020,00	98,33	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.508.300,00	134.166.300,00	96,86	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	94.250.800,00	91.708.800,00	97,30	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	30.858.800,00	29.662.800,00	96,12	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	63.392.000,00	62.046.000,00	97,87	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	40.657.500,00	40.657.500,00	100,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	40.657.500,00	40.657.500,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.410.000,00	175.506.720,00	99,48	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	176.410.000,00	175.506.720,00	99,48	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	176.410.000,00	175.506.720,00	99,48	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	314.918.300,00	309.673.020,00	98,33	0,00
	JUMLAH BELANJA	29.711.204.953,00	28.373.993.296,00	95,49	29.508.213.922,50
	SURPLUS/DEFISIT	(29.431.204.953,00)	(28.135.457.296,00)	95,59	(29.383.219.922,50)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(29.431.204.953,00)	(28.135.457.296,00)	95,59	(29.383.219.922,50)

Jambi, Januari 2026

KEPALA DINAS,

H. IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19710510 199703 1 008



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	132.467.305.714,32	126.658.671.925,85
1.1	ASET LANCAR	1.502.000,00	49.106.900,50
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	44.994.000,00
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	44.994.000,00
1.1.01.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	44.994.000,00
1.1.12	Persediaan	1.502.000,00	4.112.900,50
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.502.000,00	4.112.900,50
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.502.000,00	4.112.900,50
	JUMLAH ASET LANCAR	1.502.000,00	49.106.900,50
1.3	ASET TETAP	132.465.803.714,32	126.609.565.025,35
1.3.02	Peralatan dan Mesin	14.526.348.673,47	13.761.252.373,47
1.3.02.01	Alat Besar	10.050.000,00	8.250.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	10.050.000,00	8.250.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	4.590.216.700,00	3.956.986.700,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.300.482.700,00	3.667.252.700,00
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	289.734.000,00	289.734.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	23.339.670,00	15.739.670,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	19.159.670,00	11.559.670,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	4.180.000,00	4.180.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.592.974.325,47	6.511.165.525,47
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.191.129.487,47	1.173.116.687,47
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	4.621.665.988,00	4.557.869.988,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	780.178.850,00	780.178.850,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	863.190.000,00	863.190.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	435.247.300,00	435.247.300,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	87.612.700,00	87.612.700,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	340.330.000,00	340.330.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.600.000,00	2.600.000,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	2.600.000,00	2.600.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	277.505.200,00	277.505.200,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	275.005.200,00	275.005.200,00
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.02.10	Komputer	2.166.472.778,00	2.125.815.278,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.752.670.283,00	1.712.012.783,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	413.802.495,00	413.802.495,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	66.915.340.524,17	66.758.980.749,17
1.3.03.01	Bangunan Gedung	66.915.340.524,17	66.758.980.749,17
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.915.340.524,17	66.758.980.749,17
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.408.458.385,00	101.219.966.360,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	87.376.352.161,00	87.187.860.136,00
1.3.04.01.01	Jalan	188.492.025,00	0,00
1.3.04.01.02	Jembatan	87.187.860.136,00	87.187.860.136,00
1.3.04.02	Bangunan Air	13.494.492.656,00	13.494.492.656,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	13.494.492.656,00	13.494.492.656,00
1.3.04.04	Jaringan	537.613.568,00	537.613.568,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	504.563.568,00	504.563.568,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	33.050.000,00	33.050.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	4.241.084.528,00	4.241.084.528,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	281.761.750,00	281.761.750,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	98.484.750,00	98.484.750,00
1.3.05.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	59.930.000,00	59.930.000,00
1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	123.347.000,00	123.347.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	3.959.322.778,00	3.959.322.778,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	183.975.000,00	183.975.000,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	3.775.347.778,00	3.775.347.778,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	88.500.000,00	88.500.000,00
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	88.500.000,00	88.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	88.500.000,00	88.500.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(54.713.928.396,32)	(59.460.218.985,29)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.026.256.858,59)	(13.388.101.646,80)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(8.378.571,43)	(8.250.000,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(4.440.353.009,53)	(3.934.249.200,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(16.119.670,00)	(15.739.670,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(6.397.370.012,96)	(6.316.124.573,80)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(852.160.941,67)	(845.069.241,67)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(2.600.000,00)	(2.513.333,33)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(277.505.200,00)	(277.505.200,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.031.769.453,00)	(1.988.650.428,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(16.788.769.475,28)	(16.213.582.828,77)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(16.788.769.475,28)	(16.213.582.828,77)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(23.898.902.062,45)	(29.858.534.509,72)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(20.504.040.324,21)	(20.606.282.099,18)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(3.238.678.237,44)	(9.081.723.244,77)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(156.183.500,80)	(170.529.165,77)
	JUMLAH ASET TETAP	132.465.803.714,32	126.609.565.025,35
1.5.04	Aset Lain-lain	7.299.418.838,00	7.299.418.838,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	7.299.418.838,00	7.299.418.838,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	7.299.418.838,00	7.299.418.838,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.299.418.838,00)	(7.299.418.838,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.299.418.838,00)	(7.299.418.838,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(7.299.418.838,00)	(7.299.418.838,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	132.467.305.714,32	126.658.671.925,85
2	KEWAJIBAN	100.220.595,00	53.978.161,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	100.220.595,00	53.978.161,00
2.1.06	Utang Belanja	100.220.595,00	53.978.161,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	100.220.595,00	53.978.161,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	100.220.595,00	53.978.161,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	100.220.595,00	53.978.161,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	100.220.595,00	53.978.161,00
3	EKUITAS	132.367.085.119,32	126.604.693.764,85
3.1	EKUITAS	132.367.085.119,32	126.604.693.764,85
3.1.01	Ekuitas	104.276.621.823,32	97.176.479.842,35
3.1.01.01	Ekuitas	135.336.511.615,99	130.072.468.331,25
3.1.01.01.01	Ekuitas	135.336.511.615,99	130.072.468.331,25
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(31.059.889.792,67)	(32.895.988.488,90)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(31.059.889.792,67)	(32.895.988.488,90)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	28.090.463.296,00	29.428.213.922,50
3.1.03.01	RK PPKD	28.090.463.296,00	29.428.213.922,50
3.1.03.01.01	RK PPKD	28.090.463.296,00	29.428.213.922,50
	JUMLAH EKUITAS	132.367.085.119,32	126.604.693.764,85
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	132.467.305.714,32	126.658.671.925,85

Jambi, Januari 2026

KEPALA DINAS,

H. IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19710510 199703 1 008



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0,00	59.994.000,00	(59.994.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	238.536.000,00	0,00	238.536.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84
	JUMLAH PENDAPATAN	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84
8	BEBAN	31.298.425.792,67	33.020.982.488,90	(1.722.556.696,23)	(5,22)
8.1	BEBAN OPERASI	27.943.828.530,50	29.504.280.432,50	(1.560.451.902,00)	(5,29)
8.1.01	Beban Pegawai	13.825.712.980,00	14.491.760.629,00	(666.047.649,00)	(4,60)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.314.366.041,00	7.529.639.802,00	(215.273.761,00)	(2,86)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	5.573.585.900,00	5.740.774.550,00	(167.188.650,00)	(2,91)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	459.757.782,00	482.350.690,00	(22.592.908,00)	(4,68)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	332.299.000,00	338.015.000,00	(5.716.000,00)	(1,69)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	46.809.000,00	42.780.000,00	4.029.000,00	9,42
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	153.870.000,00	158.705.000,00	(4.835.000,00)	(3,05)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	259.770.540,00	266.215.920,00	(6.445.380,00)	(2,42)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.826.968,00	17.783.526,00	(2.956.558,00)	(16,63)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	73.017,00	74.657,00	(1.640,00)	(2,20)
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	427.480.440,00	435.876.154,00	(8.395.714,00)	(1,93)
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.473.316,00	11.772.184,00	(298.868,00)	(2,54)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	34.420.078,00	35.292.121,00	(872.043,00)	(2,47)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.511.346.939,00	6.574.040.827,00	(62.693.888,00)	(0,95)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.179.133.564,00	3.159.192.224,00	19.941.340,00	0,63
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	90.544.374,00	72.230.717,00	18.313.657,00	25,35
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.241.669.001,00	3.342.617.886,00	(100.948.885,00)	(3,02)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	388.080.000,00	(388.080.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	388.080.000,00	(388.080.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	11.694.189.120,50	14.512.519.803,50	(2.818.330.683,00)	(19,42)
8.1.02.01	Beban Barang	3.525.194.220,50	4.227.492.758,00	(702.298.537,50)	(16,61)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	3.523.904.330,50	4.227.492.758,00	(703.588.427,50)	(16,64)
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.289.890,00	0,00	1.289.890,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	5.927.084.515,00	6.713.462.616,00	(786.378.101,00)	(11,71)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	5.308.022.657,00	5.865.754.748,00	(557.732.091,00)	(9,51)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	558.470.728,00	813.875.660,00	(255.404.932,00)	(31,38)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	60.591.130,00	33.832.208,00	26.758.922,00	79,09
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	327.235.248,00	561.212.386,00	(233.977.138,00)	(41,69)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234.762.570,00	553.819.786,00	(319.057.216,00)	(57,61)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	92.472.678,00	0,00	92.472.678,00	100,00
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	7.392.600,00	(7.392.600,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.375.464.375,00	2.614.784.018,50	(1.239.319.643,50)	(47,40)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.375.464.375,00	2.614.784.018,50	(1.239.319.643,50)	(47,40)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	539.210.762,00	395.568.025,00	143.642.737,00	36,31
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	474.714.762,00	363.582.025,00	111.132.737,00	30,57
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64.496.000,00	31.986.000,00	32.510.000,00	101,64
8.1.05	Beban Hibah	2.423.926.430,00	500.000.000,00	1.923.926.430,00	384,79
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.423.926.430,00	500.000.000,00	1.923.926.430,00	384,79
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.423.926.430,00	500.000.000,00	1.923.926.430,00	384,79
	JUMLAH BEBAN OPERASI	27.943.828.530,50	29.504.280.432,50	(1.560.451.902,00)	(5,29)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.354.597.262,17	3.516.702.056,40	(162.104.794,23)	(4,61)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	140.326.164,17	153.518.272,34	(13.192.108,17)	(8,59)
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	128.571,43	0,00	128.571,43	100,00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	8.188.095,24	2.550.000,00	5.638.095,24	221,10
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	81.245.439,16	97.486.480,01	(16.241.040,85)	(16,66)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.091.700,00	7.091.700,00	0,00	0,00
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	173.333,34	520.000,00	(346.666,66)	(66,67)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	43.119.025,00	45.870.092,33	(2.751.067,33)	(6,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.319.260.104,71	1.335.616.854,60	(16.356.749,89)	(1,22)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1.319.260.104,71	1.335.616.854,60	(16.356.749,89)	(1,22)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.895.010.993,29	2.027.566.929,46	(132.555.936,17)	(6,54)
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.611.680.800,97	1.744.236.736,70	(132.555.935,73)	(7,60)
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	269.889.853,12	269.889.853,56	(0,44)	(0,00)
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	13.440.339,20	13.440.339,20	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.354.597.262,17	3.516.702.056,40	(162.104.794,23)	(4,61)
	JUMLAH BEBAN	31.298.425.792,67	33.020.982.488,90	(1.722.556.696,23)	(5,22)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(31.059.889.792,67)	(32.895.988.488,90)	1.836.098.696,23	(5,58)

Jambi, Januari 2026

KEPALA DINAS,

H. IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19710510 199703 1 008



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	126.604.693.764,85	134.486.652.192,22
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(31.059.889.792,67)	(32.895.988.488,90)
RK PPKD	28.090.463.296,00	29.428.213.922,50
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	8.731.817.851,14	(4.414.183.860,97)
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	633.230.000,00	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(2.300.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(497.915.714,29)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	86.666,67	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	613.039.054,52	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	25.325.985,12	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	105.708.418,56	0,00
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	1.713.922.575,94	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	6.112.934.860,45	0,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	27.786.004,17	0,00
EKUITAS AKHIR	132.367.085.119,32	126.604.693.764,85

Jambi, Januari 2026

KEPALA DINAS,

H. IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19710510 199703 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	5
DAFTAR ISI	13
DAFTAR TABEL	15
DAFTAR GRAFIK.....	17
RINGKASAN	18
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	18
2. NERACA	22
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	23
BAB I	24
PENDAHULUAN	24
1.1 Latar Belakang	24
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	25
1.3 Landasan Hukum	26
1.4 Sistematika Penulisan.....	28
BAB II	30
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	30
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	30
2.2 Hambatan Dan Kendaladalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan ..	32
BAB III	34
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	34
3.1 Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos Pelaporan Kuangan SKPD	34
3.1.1 Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran	34
3.1.2 Neraca	39
3.1.3 Laporan Operasional (LO)	40
3.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	42
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akutansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD	42
3.2.1 Aset Lancar	42
3.2.2 Aset Tetap	44
BAB IV.....	51

Penjelasan Atas Informasi - Informasi Non Keuangan	51
4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	51
4.1.1 Kepala Dinas.....	52
4.1.2 Sekretariat.....	52
4.1.3 Bidang Pengembangan Budaya dan Seni	53
4.1.4 Bidang Sejarah dan Purbakala.....	53
4.1.5 Bidang Pengembangan Destinasi	54
4.1.6 Bidang Pemasaran.....	56
4.1.7 Bidang Ekonomi Kreatif.....	56
4.1.8 UPTD Museum.....	57
4.1.9 UPTD Taman Budaya Jambi.....	58
4.1.10 UPTD Destinasi Pariwisata	59
4.1.11 Kelompok Jabatan Fungsional	60
4.2 Tata Kerja	60
BAB V.....	62
AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	62
5.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	62
5.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	63
5.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 1	63
5.2.2 Capaian Kinerja Indikator 2	69
5.2.3 Capaian Kinerja Indikator 3	74
5.2.4 Capaian Indikator 4	84
5.3 Realisasi Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan	95
5.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	97
BAB V.....	101
PENUTUP	101
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Keuangan	17
Tabel 2	Perbandingan Neraca 2025 dan 2024.....	19
Tabel 1.1	Perbandingan Belanja 2025 dan 2024	29
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025	32
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025	33
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Per Sumber Dana TA 2025 dan 2024	34
Tabel 3.4	Realisasi dan Pengembalian Belanja 2025	35
Tabel 3.5	Perbandingan Neraca 2025 dan 2024.....	37
Tabel 3.6	Ringkasan Belanja Operasional	38
Tabel 3.7	Perbandingan Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 2025 dan 2024	39
Tabel 3.8	Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	40
Tabel 3.9	Persediaan 2025 dan Persediaan 2024	40
Tabel 3,10	Perbandingan Aset Tetap Desember 2025 dan 2024	41
Tabel 3.11	Perbandingan Aset Pada Neraca dan Aset Tetap Dalam Buku Inventarisasi asset.....	42
Tabel 3.12	Peralatan dan Mesin	43
Tabel 3.13	Gedung dan Bangunan	44
Tabel 3.14	Jalan, Jaringan dan Irigasi	45
Tabel 3.15	Aset Tetap Lainnya	46
Tabel 3.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	46
Tabel 3.17	Akumulasi Penyusutan.....	46
Tabel 3.18	Aset Lain-lain	47
Tabel 3.19	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	47
Tabel 5.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	59

Tabel 5.2	Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025	59
Tabel 5.3	Capaian Realisasi Kinerja Indikator 1 Tahun 2025	61
Tabel 5.4	Capaian Kinerja Indikator 2	66
Tabel 5.5	Kegiatan Taman Budaya 2025	69
Tabel 5.6	Jumlah Pengunjung Museum 2025	77
Tabel 5.7	Capaian Kinerja Indikator 3	79
Tabel 5.8	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Tahun 2025	83
Tabel 5.9	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara Tahun 2025	84
Tabel 5.10	Jumlah Wisatawan Tahun 2025	84
Tabel 5.11	Capaian Realisasi Indikator 4	88
Tabel 5.12	Anggaran dan Realisasi sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025	93
Tabel 5.13	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	LRA Disbudpar TA 2025 dan TA 2024	18
Grafik 3.1	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025	32
Grafik 3.2	Realisasi Belanja Bruto	35
Grafik 3.3	Aset Desember 2025	41
Grafik 3.4	Peralatan dan Mesin	43
Grafik 3.5	Gedung dan Bangunan	44
Grafik 3.6	Jalan, Jaringan dan Irigasi	45
Grafik 5.1	Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Museum Tahun 2020-2025	78
Grafik 5.2	Perbandingan Jumlah Kunjungan Museum Tahun 2020-2025	78

RINGKASAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan dan Hibah pada Tahun Anggaran 2025 seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar **Rp.238.536.000** atau **85,19 %** dari ditargetkan dalam TA 2025 sebesar **Rp.280.000.000,00**.

Realisasi **Belanja Operasi** sebesar **Rp.28.064.320.276,00** atau mencapai **95,46 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.29.396.286.653,00** yang terdiri dari **Belanja Pegawai** sebesar **Rp.13.825.712.980,00** atau **94,67 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.14.602.862.888,00** **Belanja Barang dan Jasa** sebesar **Rp.11.814.680.866,00** atau **95,92 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.12.316.343.765,00** **Belanja Hibah** sebesar **Rp.2.423.926.430,00** atau **97,85 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.2.477.080.000,00**

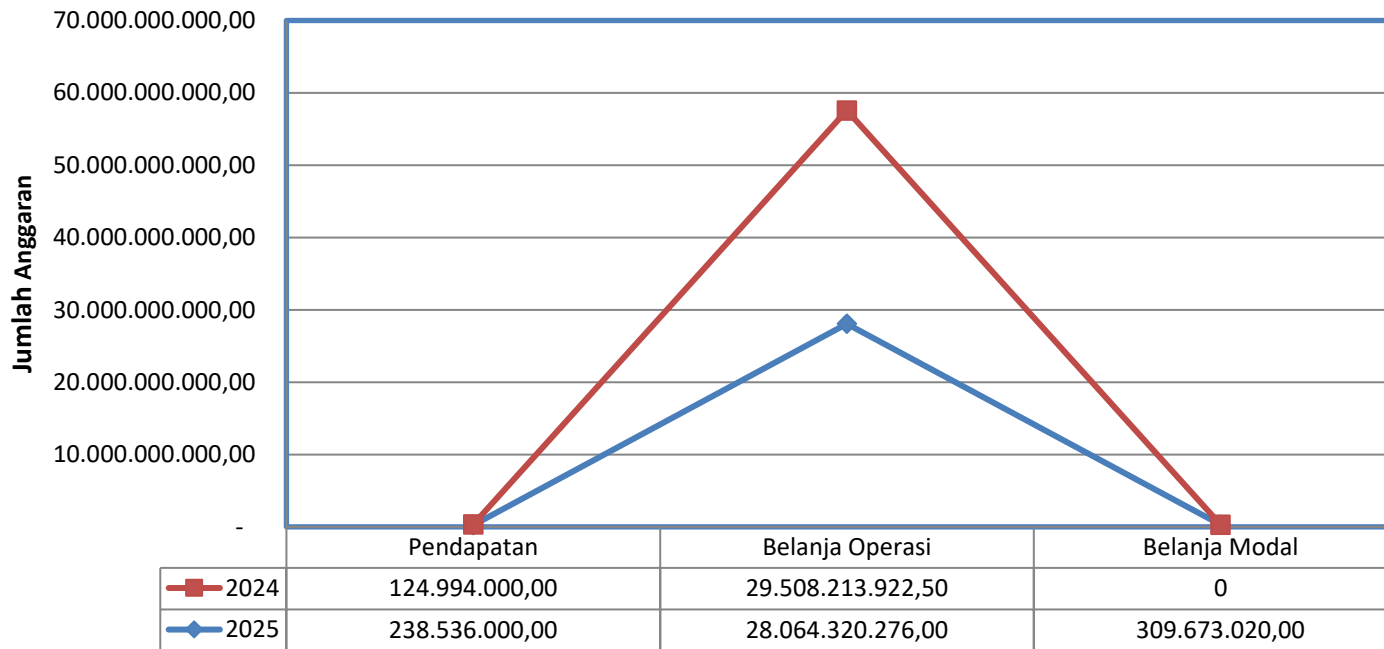
Realisasi **Belanja Modal** pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp.309.673.020,00** atau mencapai **98,33 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.314.918.300,00** Jumlah realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari realisasi **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** sebesar **Rp.134.166.300,00** atau **96,86 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.138.508.300,00** **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** sebesar **Rp.175.506.720,00** atau **99,48 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.176.410.000,00**.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	% 2025	REALISASI 2024 (RP)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	280.000.000,00	238.536.000,00	85,19	124.994.000,00
5	BELANJA DAERAH	29.711.204.953,00	28.373.993.296,00	95,49	29.508.213.922,50
5.1	BELANJA OPERASI	29.396.286.653,00	28.064.320.276,00	95,46	29.508.213.922,50
5.1.01	Belanja Pegawai	14.602.862.888,00	13.825.712.980,00	94,67	14.491.760.629,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.890.885.902,00	7.314.366.041,00	92,69	7.529.639.802,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.711.976.986,00	6.511.346.939,00	97,01	6.574.040.827,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	388.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.316.343.765,00	11.814.680.866,00	95,92	14.516.453.293,50
5.1.02.01	Belanja Barang	3.706.954.169,00	3.522.583.320,00	95,02	4.226.052.666,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.140.838.061,00	5.880.842.081,00	95,76	6.718.836.198,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	499.108.510,00	496.580.328,00	99,49	561.212.386,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.419.374.025,00	1.375.464.375,00	96,90	2.614.784.018,50
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	550.069.000,00	539.210.762,00	98,02	395.568.025,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.477.080.000,00	2.423.926.430,00	97,85	500.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.477.080.000,00	2.423.926.430,00	97,85	500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	29.396.286.653,00	28.064.320.276,00	95,46	29.508.213.922,50

5.2	BELANJA MODAL	314.918.300,00	309.673.020,00	98,33	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.508.300,00	134.166.300,00	96,86	0,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	94.250.800,00	91.708.800,00	97,30	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	40.657.500,00	40.657.500,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.410.000,00	175.506.720,00	99,48	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	176.410.000,00	175.506.720,00	99,48	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	314.918.300,00	309.673.020,00	98,33	0,00
	JUMLAH BELANJA	29.711.204.953,00	28.373.993.296,00	95,49	29.508.213.922,50
	SURPLUS/DEFISIT	(29.431.204.953,00)	(28.135.457.296,00)	95,59	(29.383.219.922,50)

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

GRAFIK LRA DISBUDPAR TA 2025 DAN TA 2024



2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 187.181.234.110,64** Yang terdiri dari :

- a. Aset Lancar : **Rp. 1.502.000**
- b. Aset Tetap : **Rp. 132.465.803.714,32**
- c. Aset Lainnya : **Rp. 0,00**

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 100.220.595,00** yang merupakan kewajiban jangka pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 132.367.085.119,32,-** Berikut disajikan dalam bentuk tabel :

URAIAN	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
ASET			
Aset Lancar	1.502.000	49.106.900,50	(47.604.900,50)
Aset Tetap	132.465.803.714,32	126.609.565.025,35	5.856.238.688,97
Aset Lainnya	-	-	
Jumlah Aset	132.465.803.714,32	126.609.565.025,35	5.856.238.688,97
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	100.220.596,00	53.978.161,00	46.242.455,00
Jumlah Kewajiban	100.220.596,00	53.978.161,00	46.242.455,00
EKUITAS			
Ekuitas	132.367.085.119,32	126.604.693.764,85	5.762.391.354,47
Jumlah Ekuitas	132.367.085.119,32	126. 604.693.764,85	5.762.391.354,47
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	132.467.305.714,32	126.658.671.925,85	5.808.633.788,47

Table 2 Perbandingan Neraca 2025 dan 2024

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti sebagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya di bandingkan dengan anggaran dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran, termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam pelaporan keuangan dibedakan menjadi 2 (dua) entitas yaitu :

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi merupakan salah satu entitas akuntansi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan oleh karenanya wajib menyusun Laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam laporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBD. Basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam Penyajian Laporan Keuangannya terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO)
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Salah satu elemen laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan terperinci yang dapat menjelaskan analisis atas nilai suatu pos yang di sajikan dalam LRA. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan, dan Belanja serta penyajian Neraca, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KASDA.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka mewujudkan good governance adalah adanya kewajiban penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang dapat diterima secara umum.

Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Semangat tersebut harus melekat pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban sampai dengan proses evaluasinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan Laporan Keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan memberikan informasi keuangan maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai dukungan bagi tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

1.3 Landasan Hukum

Peraturan Perundang - undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

- dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11);
 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, indikator tersebut adalah:

1. Masukan (Input), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan.
2. Keluaran (Output) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (Outcome) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (Benefit) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
5. Dampak (Impact) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini akan dominan berbentuk narasi deskriptif dengan penjelasan-penjelasan tambahan yang singkat dan jelas disertai angka-angka yang sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024. Cara penulisan ini diharapkan akan dapat memberi penjelasan yang memadai tentang aktivitas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tergambar melalui laporan keuangan. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dibagi dalam 5 bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III : Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

- 3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 3.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 3.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV : Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan

- 4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 4.2 Tata Kerja

BAB V : Akuntabilitas Kinerja Program dan Kegiatan

BAB VI : Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam menjalankan program dan kegiatannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi dan diimplementasikan dalam visi dan misi Dinas. Pengelolaan belanja harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan dan memajukan pariwisata serta melestarikan kebudayaan di Provinsi Jambi dan salah satu indikatornya adalah dengan meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan di Provinsi Jambi baik wisatawan nusantara maupun manca negara. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Patokan harga Belanja Daerah dan mengacu kepada anggaran yang berbasis kinerja.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi melalui APBD Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran **Belanja Daerah** sebesar **Rp. 29.711.204.953,00** yang terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar **Rp. 29.396.286.653,00** dengan rincian untuk Belanja Pegawai sebesar **Rp. 14.602.862.888,00** Belanja Barang dan Jasa **Rp. 12.316.343.765,00** Belanja Hibah **Rp. 2.477.080.000,00** Belanja Bantuan Sosial sebesar **Rp. 0,00** serta **Belanja Modal** sebesar **Rp. 314.918.300,00** yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 138.508.300,00** Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp. 176.410.000,00** yang merupakan belanja pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat atau publik dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, berupa program dan kegiatan DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi atau mengalami penurunan sebesar **Rp. 2.128.850.783,00** atau **14,96 %** jika dibandingkan dengan alokasi APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp. 31.840.055.736,00**.

Sedangkan terkait dengan belanja langsung, dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, program dan kegiatan yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dengan mengedepankan prinsip- prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Pada Tahun 2025 anggaran Belanja sebesar **Rp. 29.711.204.953,00** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 29.396.286.653,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 314.918.300,00** yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi Belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 28.373.993.296,00** atau sebesar **95,49 %** dengan perbandingan anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Uraian	Desember 2025			Des 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	280.000.000	238.536.000	85,19	124.994.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	280.000.000	238.536.000	85,19	124.994.000
Retribusi Daerah	280.000.000	238.536.000	85,19	124.994.000
Retribusi Jasa Usaha	280.000.000	238.536.000	85,19	124.994.000
JUMLAH PENDAPATAN	280.000.000	238.536.000	85,19	124.994.000
BELANJA DAERAH	29.711.204.953	28.373.993.296	95,49	29.508.213.922
BELANJA OPERASI	29.396.286.653	28.064.320.267	95,46	29.508.213.922

Belanja Pegawai	14.602.862.888	13.825.712.980	94,67	14.491.760.629
Belanja Barang dan Jasa	12.316.343.765	11.814.680.866	95,92	14.516.453.293
Belanja Hibah	2.477.080.000	2.423.926.430	97,85	500.000.000
BELANJA MODAL	314.918.300	309.673.020	98,33	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.508.300	134.166.300	96,86	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.410.000	175.506.720	99,48	0,00
JUMLAH BELANJA	29.711.204.953	28.373.993.296	95,49	29.508.213.922

Tabel 1. 1 PERBANDINGAN BELANJA 2025 dan 2024

3.2 Hambatan Dan Kendaladalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- Penandatanganan dan pengesahan DPA-SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi diterbitkan pada Bulan Februari 2025 hal ini disebabkan oleh adanya Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non Fisik Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang kelengkapannya berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum dilengkapi dan menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian DPA-SKPD.
- Penyerapan anggaran baru dilaksanakan pada Bulan Februari dikarenakan DPA-SKPD baru disyahkan sehingga pengambilan Uang Persediaan (UP), pengisian Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

dilaksanakan pada Bulan Februari 2025 sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

- c. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- d. Kurang optimalnya koordinasi antar Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sehingga menghambat pencapaian realisasi program maupun kegiatan.
- e. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos Pelaporan Kuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

Target Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah), Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dialokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam TA 2025 sebesar **Rp. 280.000.000,00** realisasi sampai dengan TA 2025 sebesar **Rp.238.536.000,00** atau **85,19 %**

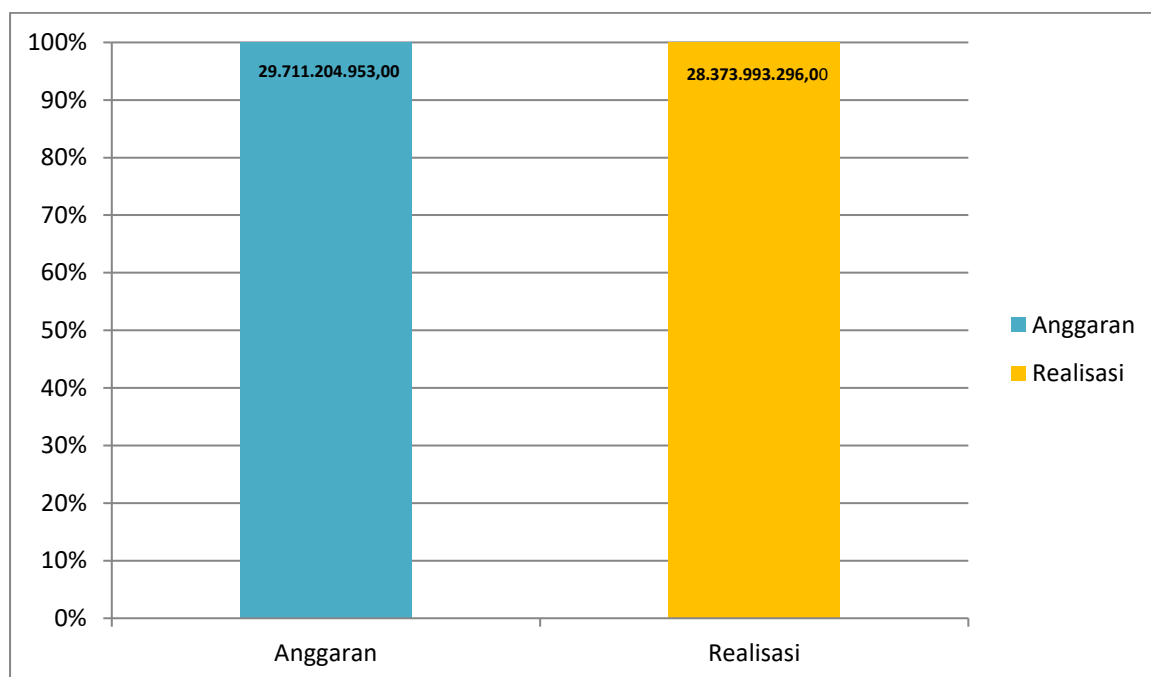
Sedangkan Pagu Belanja Daerah, Belanja Operasi yang dianggarkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam TA 2025 sebesar **Rp. 29.711.204.953,00** terealisasi sampai dengan 31 Desember TA 2025 sebesar **Rp.28.373.993.296,00** .atau **95,49 %** Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH	280.000.000	238.536.000	85,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH	280.000.000	238.536.000	85,19
Retribusi Daerah	280.000.000	238.536.000	85,19
Retribusi Jasa Usaha	280.000.000	238.536.000	85,19
JUMLAH PENDAPATAN	280.000.000	238.536.000	85,19
BELANJA DAERAH	29.711.204.953	28.373.993.296	95,49
BELANJA OPERASI	29.396.286.653	28.064.320.267	95,46
Belanja Pegawai	14.602.862.888	13.825.712.980	94,68
Belanja Barang dan Jasa	12.316.343.765	11.814.680.866	95,92

Belanja Hibah	2.477.080.000	2.423.926.430	97,85
BELANJA MODAL	314.918.300	309.673.020	98,33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.508.300	134.166.300	96,86
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.410.000	175.506.720	99,48
JUMLAH BELANJA	29.711.204.953	28.373.993.296	95,49

Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Dan Belanja TA 2025

Grafik perbandingan anggaran dan realisasi belanja selama Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik 3. 1 Grafik Perbandingan anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2025

Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH	280.000.000	238.536.000	85,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH	280.000.000	238.536.000	85,19
Retribusi Daerah	280.000.000	238.536.000	85,19
Retribusi Jasa Usaha	280.000.000	238.536.000	85,19

Tabel 3. 2 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 238.536.000** seluruhnya merupakan Pendapatan Retribusi Daerah yang merupakan target pendapatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dan dibukukan sebagai pendapatan Daerah.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan perhitungan bruto sebesar **Rp.28.373.993.296,00** atau **95,49 %** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar **Rp.29.711.204.953,00** . Dibandingkan dengan realisasi belanja bruto Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.29.508.213.922,00**, terdapat penurunan realisasi sebesar **Rp.1.134.220.626,00** dari jumlah anggaran dalam APBD TA 2024 sebesar **Rp. 31.840.055.736,00**.

Realisasi Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 per Sumber Dana terdiri dari (1) **Belanja Pegawai** sebesar **Rp.13.825.712.980,00** atau **94,67%** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar **Rp. 14.602.862.888,00** (2) **Belanja Barang dan Jasa** sebesar **Rp.11.814.680.866,00** atau **95,92 %** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar **Rp.12.316.343.765,00** (3) **Belanja Hibah** sebesar **Rp.2.423.926.430,00** atau **97,85 %** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar **Rp.**

2.477.080.000,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 per sumber dana dan jenis belanja dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Desember 2025			Des 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA DAERAH	29.711.204.953	28.373.993.296	95,49	29.508.213.922
BELANJA OPERASI	29.396.286.653	28.064.320.267	95,46	29.508.213.922
Belanja Pegawai	14.602.862.888	13.825.712.980	94,67	14.491.760.629
Belanja Barang dan Jasa	12.316.343.765	11.814.680.866	95,92	14.516.453.293
Belanja Hibah	2.477.080.000	2.423.926.430	97,85	500.000.000
BELANJA MODAL	314.918.300	309.673.020	98,33	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.508.300	134.166.300	96,86	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.410.000	175.506.720	99,48	0,00
JUMLAH BELANJA	29.711.204.953	28.373.993.296	95,49	29.508.213.922

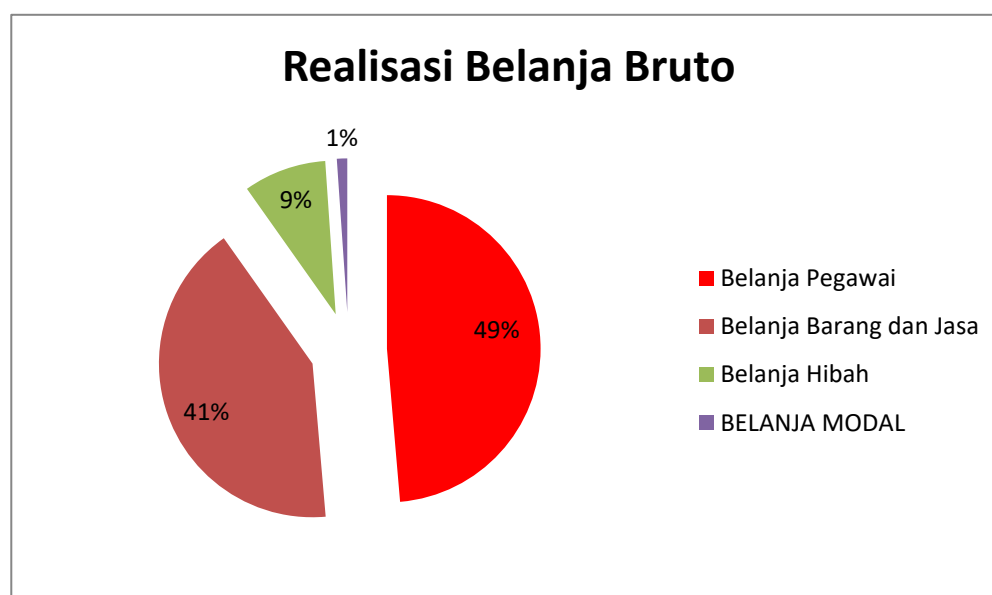
Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 28.427.146.866** merupakan realisasi belanja netto yaitu realisasi belanja setelah dikurangi pengembalian belanja (SSP) atas belanja yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Uraian	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja Neto
BELANJA DAERAH	28.427.146.866	82.641.128,00	28.373.993.296
BELANJA OPERASI	28.117.473.846	0,00	28.064.320.276

Belanja Pegawai	13.825.712.980	0,00	13.825.712.980
Belanja Barang dan Jasa	11.814.680.866	0,00	11.814.680.866
Belanja Hibah	2.477.080.000	0,00	2.423.926.430
BELANJA MODAL	309.673.020	0,00	309.673.020
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.166.300	0,00	134.166.300
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.506.720	0,00	175.506.720
JUMLAH BELANJA	28.427.146.866	82.641.128,00	28.373.993.296

Tabel 3.4 Realisasi dan pengembalian Belanja 2025



Grafik 3.2 Realisasi Belanja Bruto

3.1.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 187.181.234.110,64** Yang terdiri dari :

- a. Aset Lancar : **Rp. 1.502.000**
- b. Aset Tetap : **Rp. 132.465.803.714,32**
- c. Aset Lainnya : **Rp. 0,00**

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 100.220.595,00** yang merupakan kewajiban jangka pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 132.367.085.119,32,-** Berikut disajikan dalam bentuk tabel :

URAIAN	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
ASET			
Aset Lancar	1.502.000	4.112.900	(2.610.900,00)
Aset Tetap	132.465.803.714,32	126.627.662.958,68	5.856.238.688,97
Aset Lainnya	-	-	
Jumlah Aset	132.467.305.714,32	126.658.671.925,85	5.808.633.788,47
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	100.220.596,00	53.978.161,00	46.242.435,00
Jumlah Kewajiban	100.220.596,00	53.978.161,00	46.242.435,00

EKUITAS			
Ekuitas	132.367.085.119,32	126.604.693.764,85	5.762.391.354,47
Jumlah Ekuitas	132.367.085.119,32	126.604.693.764,85	5.762.391.354,47
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	132.467.305.714,32	126.658.671.925,85	5.808.633.788,47

Table 3.5 Perbandingan Neraca 2025 dan 2024

3.1.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Ringkasan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
PENDAPATAN	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84
Pendapatan Asli Daerah – LO	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84
Retribusi Daerah – LO	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84
Retribusi Jasa Usaha – LO	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	(100,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	59.994.000,00	(59.994.000,00)	(100,00)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	238.536.000,00	0,00	238.536.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84
Jumlah Pendapatan	238.536.000,00	124.994.000,00	113.542.000,00	90,84

BEBAN	31.298.425.792,67	33.020.982.488,90	(1.722.556.696,23)	(5,22)
BEBAN OPERASI	27.943.828.530,50	29.504.280.432,50	(1.560.451.902,00)	(5,29)
Beban Pegawai	13.825.712.980,00	14.491.760.629,00	(666.047.649,00)	(4,60)
Beban Barang dan Jasa	11.649.189.120,50	14.512.519.803,50	(2.818.330.683,00)	(19,42)
Beban Hibah	2.423.926.430,00	500.000.000,00	1.923.926.430,00	384,79
JUMLAH BEBAN OPERASI	27.943.828.530,50	29.504.280.432,50	1.560.451.902,00)	(5,29)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.354.597.262,17	3.516.702.056,40	(162.104.794,23)	(4,61)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	140.326.164,17	153.518.272,34	(13.192.108,17)	(8,59)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.319.260.104,71	1.335.616.854,60	(16.356.749,89)	(1,22)
Beban Penyusutan Jalan dan Irigasi	1.895.010.993,29	2.027.566.929,46	(132.555.936,17)	(6,54)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.354.597.262,17	3.516.702.056,40	(162.104.794,23)	(4,61)
Jumlah Beban	31.298.425.792,67	33.020.982.488,90	(1.722.556.696,23)	(5,22)
Surplus / Defisit - Lo	(31.059.889.792,67)	(32.895.988.488,90)	1.836.098.696,23	(5,58)

Tabel 3.6 Ringkasan Belanja Operasional

3.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	126.604.693.764,85	134.486.652.192,22
Surplus/ Defisit-Lo	(31.059.889.792,67)	(32.895.988.488,90)
Rk Ppkd	28.090.463.296,00	29.428.213.922,50
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
LAIN-LAIN	8.731.817.851,14	(4.414.183.860,97)
EKUITAS AKHIR	132.367.085.119,32	126.604.693.764,85

Tabel 3.7 Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 2025 dan 2024

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

3.2.1 Aset Lancar

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar **(Rp.0,00)** Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal

dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Bila dibandingkan dengan saldo kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 44.994.000,00.-**

B. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar **(Rp.0,00)** Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal setoran dari penerimaan retribusi jasa usaha daerah berupa penyewaan gedung dan tiket masuk pada museum di UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Bila dibandingkan dengan saldo kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 44.994.000,00.-**

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	44.994.000	(44.994.000)	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	44.994.000	(44.994.000)	-
Jumlah	0,00	0,00	0,00	-

Tabel 3.8 Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

C. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 1.502.000,00** merupakan barang habis pakai untuk operasional kantor termasuk kegiatan berdasarkan penghitungan fisik dan Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat, pada saat pemeriksaan BPK telah diserahkan ke masyarakat. Dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.4.112.900,00** terdapat penurunan sebesar **Rp.2.610.900,00.,**

Uraian	2025	2024	(PENURUNAN)	(TURUN)
Persediaan	1.502.000,00	4.112.900,00	(2.619.900,00)	-
Jumlah Aset Lancar	1.502.000,00	4.112.900,00	(2.610.900,00)	-

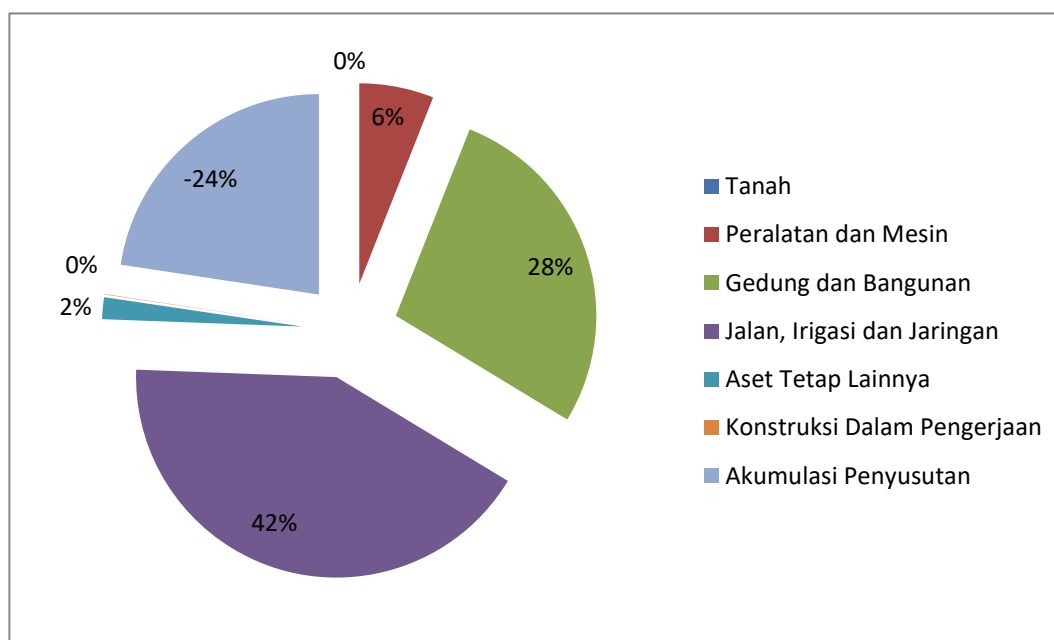
Tabel 3.9 Persediaan 2025 dan Persediaan 2024

3.2.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.132.465.803.714,32** merupakan saldo aset tetap milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Dibandingkan dengan periode sebelumnya yang merupakan saldo awal per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.126.609.565.025,35** terdapat peningkatan sebesar **Rp. 5.856.238.688,97** dari Tahun Anggaran Yang Lalu.

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	14.526.348.673,47	13.761.252.373,47	765.096.300,00
Gedung dan Bangunan	66.915.340.524,17	66.758.980.749,17	156.359.775,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.408.458.385,00	101.219.966.360,00	188.492.025,00
Aset Tetap Lainnya	4.241.084.528,00	4.241.084.528,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	88.500.000,00	88.500.000,00	-
Akumulasi Penyusutan	(54.713.928.396,32)	(59.460.218.985,29)	(4.746.290.588,97)
Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya	132.467.305.714,32	126.658.671.925,85	5.808.633.788,47

Tabel 3.10 Perbandingan aset tetap Desember 2025 dan 2024



Grafik 3.3 Aset Desember 2025

URAIAN	ASET DALAM NERACA	ASET DALAM BMD	SELISIH
Aset Lancar	1.502.000,00	1.502.000,00	-
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	14.526.348.673,47	14.526.348.673,47	-
Gedung dan Bangunan	66.915.340.524,17	66.915.340.524,17	-
Jalan, Jaringan dan Irigasi	101.408.458.385,00	101.408.458.385,00	-
Aset Tetap Lainnya	4.241.084.528,00	4.241.084.528,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	88.500.000,00	88.500.000,00	-
Akumulasi Penyusutan	(54.713.928.396,32)	(54.713.928.396,32)	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	7.299.418.838,00	7.299.418.838,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.299.418.838,00)	(7.299.418.838,00)	-
Jumlah Aset	132.467.305.714,32	132.467.305.714,32	-

Tabel 3.11 Perbandingan Aset pada Neraca dan Aset Tetap Dalam Buku Inventarisasi Aset

A. Kondisi Barang Milik Daerah

Saldo Aset sebesar **Rp. 132.467.305.714,32** diklasifikasikan sebagaimana Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan kondisi BMD sebagai berikut :

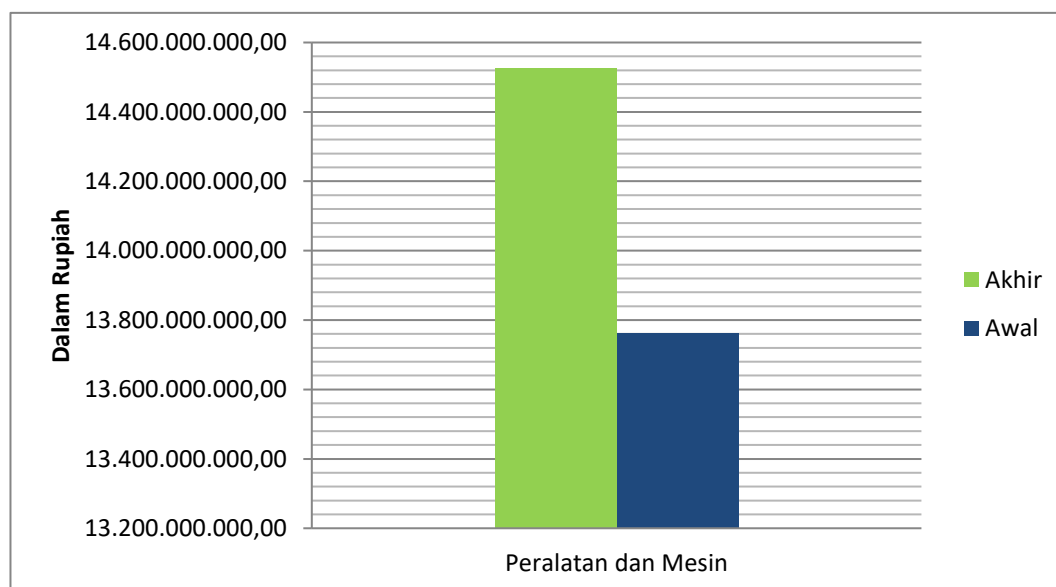
- 1) Kondisi Baik (B) : **Rp. 132.467.305.714,32**
- 2) Kondisi Rusak Ringan (RR) : **Rp. 0,00**
- 3) Kondisi Rusak Berat (RB) : **Rp. 0,00**

B. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 14.526.348.673,47**. Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 13.761.252.373,47** terdapat kenaikan sebesar **Rp.765.096.300,00** atau **0,55 %** dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Peralatan dan Mesin	14.526.348.673,47	13.761.252.373,47	765.096.300,00	0,55%
Jumlah	14.526.348.673,47	13.761.252.373,47	765.096.300,00	0,55%

Tabel 3.12 Peralatan dan Mesin



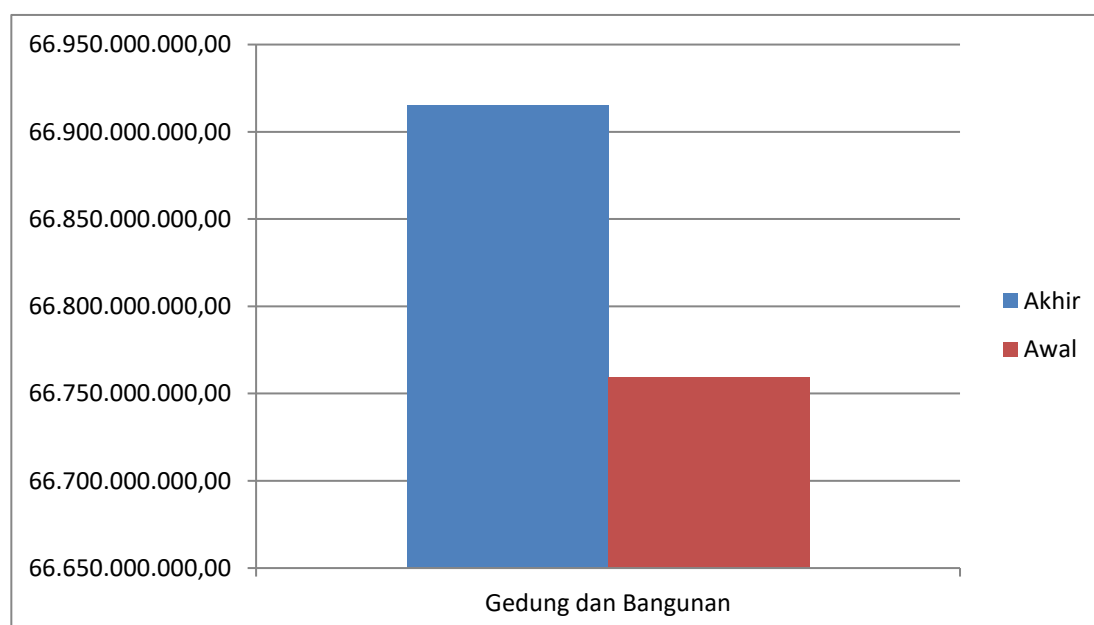
Grafik 3.4 Peralatan dan Mesin

C. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.66.915.340.524,17** Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.66.758.980.749,17** terdapat kenaikan sebesar **Rp. 156.359.775,00** atau sebesar **0,23 %** dari Tahun Anggaran yang lalu, dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Gedung dan Bangunan	66.915.340.524,17	66.758.980.749,17	156.359.775,00	0,23%
Jumlah	66.758.980.749,17	66.758.980.749,17	156.359.775,00	0,23%

Tabel 3.13 Gedung dan Bangunan



Grafik 3.5 Gedung dan Bangunan

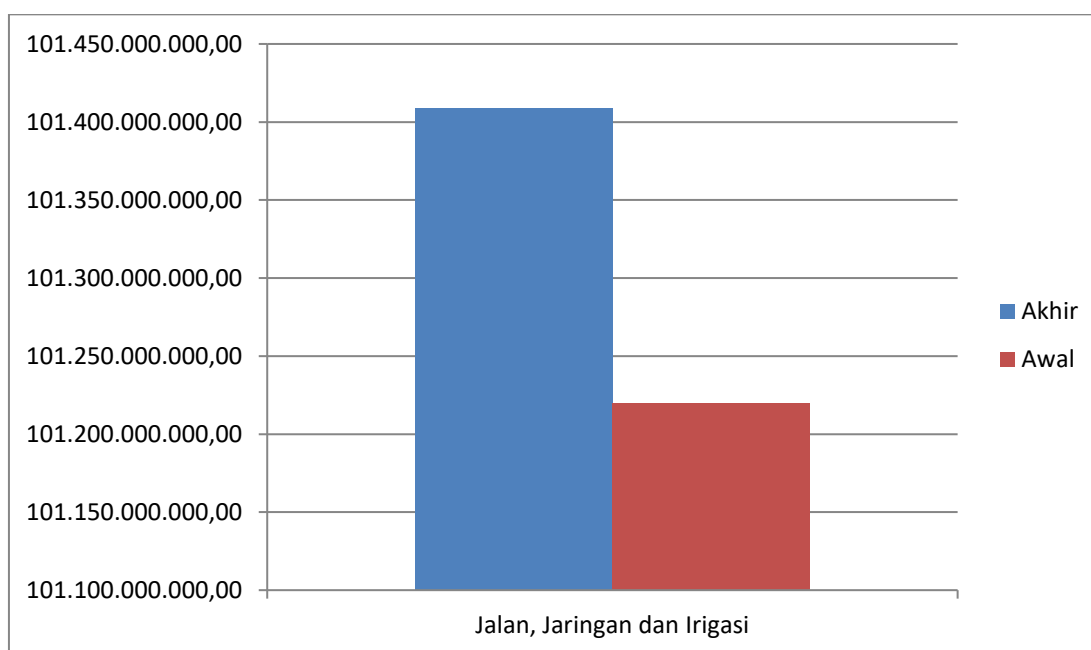
D. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 101.408.458.385,00** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 101.219.966.360,00** terdapat

kenaikan sebesar **Rp.188.492.025,00** atau sebesar **0,18 %** dari Tahun Anggaran yang lalu dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	101.408.458.385,00	101.219.966.369,00	188.492.025,00	0,18%
Jumlah	14.526.348.673,47	13.761.252.373,47	765.096.300,00	0,18%

Tabel 3.14 Jalan, Jaringan dan Irigasi



Grafik 3.6 Jalan, Jaringan dan Irigasi

E. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 4.241.084.528,00**. Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.4.241.084.528,00** Tidak terdapat kenaikan/penurunan sebesar **Rp.0,00** atau sama dengan Tahun yang lalu dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Aset Tetap Lainnya	4.241.048.528,00	4.241.048.528,00	-	-
Jumlah	4.241.048.528,00	4.241.048.528,00	-	-

Tabel 3.15 Aset Tetap Lainnya

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 88.500.000,00** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 88.500.000,00** tidak terdapat kenaikan/ penurunan dari Tahun Anggaran Yang lalu, dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Konstruksi dalam Pengerjaan	88.500.000,00	88.500.000,00	-	-
Jumlah	88.500.000,00	88.500.000,00	-	-

Tabel 3.16 Konstruksi dalam Pengerjaan

G. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. (54.713.928.396,32)** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. (59.460.218.985,29)** terdapat penurunan sebesar **Rp. (4.746.290.588,97)** dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Akumulasi Penyusutan	(54.713.928.396,32)	(59.460.218.985,29)	(4.746.290.588,97)	0,79%
Jumlah	(54.713.928.396,32)	(59.460.218.985,29)	(4.746.290.588,97)	0,79%

Tabel 3.17 Akumulasi Penyusutan

H. Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 7.299.418.838,00** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 7.299.418.838,00** tidak terdapat kenaikan/ penurunan atau sama dengan Tahun Anggaran yang lalu, dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Aset Lain-lain	7.299.418.838,00	7.299.418.838,00	-	-
Jumlah	7.299.418.838,00	7.299.418.838,00	-	-

Tabel 3.18 Aset lain-lain

I. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. (7.299.418.838,00)**. Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. (7.299.418.838,00)** tidak terdapat kenaikan/ penurunan atau sama dengan Tahun Anggaran yang lalu, dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(7.299.418.838,00)	(7.299.418.838,00)	-	-
Jumlah	(7.299.418.838,00)	(7.299.418.838,00)	-	-

Tabel 3.19 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

J. Kewajiban dan Ekuitas Dana

Saldo Kewajiban yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp.100.220.595,00** dan Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 132.367.085.119,32**. Total Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar **Rp.132.467.305.714,32** merupakan kekayaan bersih pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi).

BAB IV

Penjelasan Atas Informasi - Informasi Non Keuangan

4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok: “Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata”.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mendukung dan menjalankan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu (1) Museum Siginjei, (2) Museum Perjuangan Rakyat Jambi, dan (3) Taman Budaya Jambi.

Berikut tugas dan fungsi dari pemangku jabatan dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi seperti yang diatur dalam PERGUB Jambi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

4.1.1 Kepala Dinas

Tugas:

- a. Membantu Gubernur dibidang tugasnya
- b. Memimpin segala kegiatan dinas
- c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Gubernur baik diminta atau tidak sehubungan dengan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil
- d. Melaksanakan perintah dan atau Instruksi Gubernur
- e. Mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan dinas lain untuk kelancaran tugas dinas
- f. Melaporkan segala kegiatan kepada Gubernur
- g. Membina Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD)

4.1.2 Sekretariat

Tugas:

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, menganalisa dan mengarahkan dalam melakukan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program

Fungsi:

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan
- b. Melakukan urusan rumah tangga, protokol dan surat menyurat
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan penyusunan program

4.1.3 Bidang Pengembangan Budaya dan Seni

Tugas :

Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta menyelenggarakan pengembangan di bidang nilai budaya dan seni.

Fungsi:

- a. Menyiapkan analisa rencana pengembangan dan penyelenggaraan nilai budaya dan seni
- b. Menyiapkan kebijaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rencana operasional di bidang nilai budaya dan seni
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang nilai budaya dan seni

4.1.4 Bidang Sejarah dan Purbakala

Tugas:

Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas mengelola kebudayaan khususnya bidang sejarah, purbakala, dan permuseuman yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang sejarah dan purbakala berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta ketentuan perundang- undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Penyiapan kebijakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan rencana operasional di bidang sejarah dan purbakala.
- c. Penyiapan bahan pembinaan di bidang sejarah dan purbakala.
- d. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan penelitian di bidang sejarah

dan purbakala.

- e. Pembuatan laporan kegiatan di bidang sejarah dan purbakala sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- f. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- g. Pelaksanaan Tugas yang diberikan atasan

4.1.5 Bidang Pengembangan Destinasi

Tugas:

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, memfasilitasi, mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan serta pengembangan sumber daya wisata, alam dan budaya.

Fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengorganisiran seluruh kegiatan pada bidang pengembangan destinasi pariwisata
- b. Pembuatan rencana dan program kerja tahunan bidang pengembangan destinasi pariwisata
- c. Penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- d. Penganalisisan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- f. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- g. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata

kabupaten/kota

- h. Perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- i. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Perencanaan pengembangan pengusahaan di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata
- l. Penyiapan bahan informasi dan perkembangan investasi di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota
- m. Penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata, pemberdayaan serta objek dan daya tarik wisata kabupaten/kota
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan usaha di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- o. Penyampaian informasi, pertimbangan dan saran dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- p. Pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas
- q. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengembangan destinasi pariwisata
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

4.1.6 Bidang Pemasaran

Tugas:

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi pariwisata, pengembangan pasar dan kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan kabupaten/kota dan *stakeholder* dan lembaga- lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar;
- b. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- c. Penyiapan bahan promosi berbasis media/teknologi informasi dalam rangka menyelenggarakan kegiatan promosi, publikasi, pelayanan informasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif di bidang pemasaran pariwisata;
- d. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.1.7 Bidang Ekonomi Kreatif

Tugas:

teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, sarana dan prasarana, supervisi, pemantauan, analis, dan pelaporan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan ekonomi kreatif;
- b. Perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Fasilitasi dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan bahan rumusan kebijakan pengembangan produk inovatif dan tata kelola ekonomi kreatif;
- e. Pelaksanaan potensi sumber daya, serta industri ekonomi kreatif;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomikreatif;
- g. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif kepada Kepala Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1.8 UPTD Museum

Tugas:

Museum umum mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penetbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal dan regional (Provinsi).

Fungsi:

- a. Pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda- benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- b. Pengenalan dan menyebarluaskan hasil penelitian benda-benda yang

- mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- c. Melakukan perawatan/pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
 - d. Pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi
 - e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha

4.1.9 UPTD Taman Budaya Jambi

Tugas:

Taman Budaya Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan pariwisata dalam bidang kegiatan pembinaan dan pengembangan seni budaya lokal dan regional di Provinsi Jambi.

Fungsi :

- a. Pelaksana kegiatan laboratoris berupa pengkajian, revitalisasi pengolahan dan eksperimentasi
- b. Pelatihan dan bimbingan
- c. Pelaksana pameran dan pertunjukan seni budaya
- d. Pelaksana ceramah, temu karya, sarasehan, lokakarya, workshop, diskusi seminar dan temu karya.
- e. Pelaksanaan dokumentasi, perpustakaan budaya, informasi seni, promosi dan sosialisasi.
- f. Pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga Taman Budaya.

4.1.10 UPTD Destinasi Pariwisata

Tugas:

UPTD Destinasi Pariwisata mempunyai tugas membantu sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada Dinas di bidang destinasi pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang tata usaha, pengembangan
- b. atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- c. perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang tata usaha, pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan dan kegiatan tata usaha, pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan tata usaha, pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- f. pembinaan dan pengembangan kegiatan ketatausahaan, atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- g. pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, dan pihak lainnya dalam rangka pengembangan atraksi dan promosi, pengembangan usaha dan produk wisata, serta keamanan destinasi pariwisata;
- h. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1.11 Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas:

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- b. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.
- d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- b. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- c. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diterima

oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 5.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.2 Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Provinsi Jambi Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya pelestarian budaya dan nilai tambah sektor pariwisata	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	44,30	25,49	57,54	Rendah
		Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	33,23	35,08	105,57	Sangat Baik
		Nilai Dimensi Warisan Budaya	55,25	57,02	103,2	Sangat Baik
		Pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum	1 %	1,08%	108	Sangat Baik

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Pada tahun 2025, 3 (tiga) indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan, dan 1 (satu) capaian indikator bernilai rendah.

5.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2025, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar **93,58%** Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

5.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran #1 Meningkatnya pelestarian budaya dan nilai tambah sektor pariwisata memiliki tiga indikator, yaitu:

Nilai Dimensi Ekonomi Budaya, menggambarkan peranan budaya dalam menggerakkan perekonomian. Dengan kata lain, dimensi ekonomi budaya berfokus pada perwujudan nilai-nilai budaya menjadi produk/aktivitas. Dimensi ini merupakan konsep yang mengukur kontribusi sektor kebudayaan terhadap perekonomian, mencakup pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, industri kreatif serta dampak budaya pada etos kerja, konsumsi dan pengelolaan sumber daya.

Indikator ini dicapai melalui Program Pengembangan Kebudayaan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi
3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Adapun pencapaian Program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Capaian Realisasi Kinerja Indikator I Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
I	Meningkatnya pelestarian budaya dan nilai tambah sektor pariwisata	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	44,30	25,49	57,54
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah karya budaya	608 karya	608	100
1.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	Jumlah fasilitasi seni budaya	80 kelompok	80	100

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.				
1.1.1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 objek	1	100
1.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	70 org	61	88
1.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi seni budaya tradisional	43 karya	35	85
1.2.1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	5 objek	5	100
1.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi lembaga adat	12 lembaga	12	100
1.3.1	Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah objek pemajuan	1 objek	1	100

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	lembaga adat yang telah dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan			

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini antara lain:

- Tampilan kesenian penyambutan tamu negara dengan jumlah penampilan sebanyak 80 kali
- Bantuan fasilitasi akta notaris kepada 34 sanggar di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi
- Bantuan alat-alat kesenian kepada sanggar seni dan majelis taklim di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi
- Pendataan maestro seni budaya
- Pendaftaran Karya Seni Budaya Jambi Menjadi Warisan Budaya Takbenda Nasional

Kegiatan-Kegiatan LAM Jambi Provinsi. Jambi yang telah dilaksanakan antara lain:

- Evaluasi Tim Restorative Justice LAM Jambi Provinsi Jambi ke seluruh Kab/Kota'Penilaian Kampung Adat. Kelompok Belajar Adat/Sanggar Adat di seluruh Kab/Kota, penilaian apresiasi kinerja seluruh LAM,
- Penulisan Buku Sejarah Pemerintahan Lokal Melayu Jambi dan Buku Standar Operasional Penganugerahan Gelar Adat Melayu Jambi
- Studi Tiru ke Prov. Riau dalam rangka Penyusunan Peraturan Organisasi tentang Pakaian dan Pelaminan Adat Melayu Jambi dan survey gedung

Balai Adat Kepulauan Riau. Studi Tiru ke Istana Silinduang Bulan Pagaruyung Kab. Tanah Datar dalam rangka Penelitian dan Penelusuran Silsilah Puti Selaro Pinang Masak dan Konsultasi dengan Pengurus LKAAM Kota Bukit Tinggi tentang Penerapan Hukum Adat di Kota Bukit Tinggi dan ke Sekretariat Majelis Penyeimbang Adat Lampung

- Koordinasi dengan LAM Jambi Perwakilan Khusus DKI Jakarta di Jakarta
- Kegiatan Sekretariat Bersama Lembaga Adat Rumpun Melayu se-Sumatera di Provinsi Riau dan Sumatera Utara
- Ikut berpartisipasi dalam Pawai Pembangunan dan Sedekah Negeri dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-80.
- Pembinaan/pelatihan dengan para peserta yang berasal dari Kab/Kota
- Kegiatan Pengukuhan Pemangku Adat
- Rapat Koordinasi HPMJ, Rakerda LAM Jambi, Hari Adat Melayu Jambi, Seminar Pakaian dan Pelaminan Adat Melayu Jambi dan Seminar Nasional oleh Bidang LITBANG.

Tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) karya seni budaya Jambi telah ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda nasional dengan SK Menteri Kebudayaan RI yaitu:

1. Bahasa Kubu (Bahasa Orang Rimba) – Kabupaten Sarolangun
2. Ritus Bagelek – Kabupaten Bungo
3. Tradisi Lukah Gilo Dusun Baru – Kabupaten Muaro Jambi
4. Seni pertunjukan Tonel Tebat Patah - Kabupaten Muaro Jambi
5. Kuluk Kerinci – Kabupaten Kerinci
6. Tari Teluk Kembang – Kabupaten Tebo
7. Tradisi Tongkeng Betung Bedarah – Kabupaten Tebo
8. Seni pertunjukan Gandai – Kabupaten Tebo
9. Tari Dana Sarah Kota Jambi Seberang, Kota Jambi

Dengan tambahan sembilan penetapan ini, Provinsi Jambi telah memiliki 77 Penetapan Warisan Budaya takbenda sejak tahun 2014

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Jambi.

Dari target indikator sasaran yang ditetapkan, realisasi capaian sasaran tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pertunjukan seni budaya belum menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain;

- Permintaan pasar masih rendah karena minat masyarakat terhadap pertunjukan seni budaya masih kalah dibanding hiburan modern. Pertunjukan tradisional sering dianggap kurang menarik bagi generasi muda.
- Kurangnya komersialisasi dan model bisnis. Banyak pelaku seni masih berorientasi pada pelestarian, bukan bisnis serta belum ada atau minimnya manajemen pertunjukan.
- Promosi dan pemasaran masih belum optimal, minim penggunaan media sosial dan platform digital dan informasi pertunjukan tidak menjangkau audiens luas.
- Keterbatasan akses panggung dan event dimana pertunjukan hanya muncul saat festival, acara pemerintah dan event tertentu sehingga frekuensi tampil rendah yang berdampak pada penghasilan yang tidak rutin.
- Ketergantungan pada pemerintah. Banyak kegiatan seni didanai oleh pemerintah sehingga jika tidak ada program atau anggaran maka tidak ada pertunjukan.
- Kualitas dan inovasi pertunjukan kurang berkembang. Beberapa pertunjukan kurang dikemas modern dan kurang adaptif dengan selera

pasar sehingga sulit bersaing dengan hiburan lain. Pertunjukan budaya belum terintegrasi dengan sektor pariwisata yang dikemas sebagai atraksi wisata rutin dan paket wisata budaya.

5.2.2 Capaian Kinerja Indikator 2

Nilai dimensi ekspresi budaya merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai bentuk ungkapan budaya—seperti seni, bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Nilai ini bertujuan antara lain menjaga dan melestarikan budaya agar tetap hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya, membentuk identitas dan jati diri masyarakat melalui simbol, tradisi, dan karya budaya, menjadi sarana komunikasi budaya, baik di dalam masyarakat maupun dengan budaya lain serta mengembangkan kreativitas dan apresiasi seni sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Indikator ini dicapai melalui Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan:

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 5.4 Capaian Kinerja Indikator 2

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya pelestarian budaya dan nilai tambah sektor pariwisata	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya.	33,23	35,08	105,57
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah apresian di Taman Budaya Jambi	54.000 apresian	77.988	144,42
2.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kompetensi dan kapasitas tata kelola lembaganya	780 orang	2.428	311,28

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
2.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan latihan (ditingkatkan kompetensinya)	200 orang	300	150
2.1.2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	55 lembaga	61	111

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Kegiatan Pelindungan
 - a. Perpustakaan Budaya, memiliki 2.596 koleksi buku budaya
 - b. Dokumentasi karya budaya berupa audio/visual sebanyak 34 file, penerbitan Bulletin Informasi Seni sebanyak 4 kali dan penerbitan Naskah Budaya sebanyak 2 kali.
 - c. Publikasi seni melalui media online sebanyak 88 kali
2. Kegiatan Pengembangan
 - a. Pengolahan/Eksperimentasi Seni, dilakukan sebanyak 2 kali.
 - b. Gelar Seni, yaitu penyajian karya seni pertunjukan (tari, musik dan teater) maupun rupa dilaksanakan sebanyak 18 kali
3. Pemanfaatan
 - a. Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia dan Temu Karya Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi
 - b. Pameran Seni Rupa dan Pameran Karya Budaya berupa pameran fotografi jurnalistik
4. Pembinaan

- a. Lokakarya seni dengan tema 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Sebagai Sumber Inspirasi Kekaryaannya.
- b. Workshop Tari diikuti 50 orang yang berasal dari komunitas seni dari kabupaten/ kota di Provinsi Jambi
- c. Workshop Musik diikuti 50 orang yang berasal dari komunitas seni dari kabupaten/ kota di Provinsi Jambi
- d. Workshop Teater diikuti 50 orang yang berasal dari komunitas teater dari kabupaten/ kota di Provinsi Jambi
- e. Workshop Sastra, diikuti 50 peserta yang berasal dari komunitas seni dari kabupaten/ kota di Provinsi Jambi.
- f. Workshop Seni Rupa, diikuti 50 peserta yang berasal dari komunitas seni dari kabupaten/ kota di Provinsi Jambi.
- g. Festival Tari Remaja atau Lomba Seni, diikuti 24 kelompok seni, Festival Teater Remaja, diikuti 30 kelompok

Faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja:

- Perlibatan sanggar/komunitas seni dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat pencapaian target kinerja:

- Fragmentasi ekosistem yang belum terintegrasi karena umumnya kerja sama bersifat event based, bukan jangka panjang
- Kapasitas manajerial yang terbatas dan kuratorial yang terbatas, akibatnya Taman Budaya Jambi belum sepenuhnya menjadi ruang produksi gagasan kebudayaan, tetapi hanya sebuah ruang presentasi

Solusi:

- Mengubah pola: dari event ke programatik dengan cara membuat program tahunan
- Penguatan kuratorial dan wacana yang menghadirkan narasi besar tiap kegiatan.

Tabel 5.5 Kegiatan Taman Budaya 2025

No	Kegiatan	Peyelenggara	Jumlah		Jumlah			
			Pendukung Acara		Umum	Seniman	Mhs	Pelajar
1	Pementasan Teater 'KUTHA'	Teater AiR Jambi	35	orang	105	125	250	1.425
2	Pementasan Teater 'Menunggu Godot' dan Monolog 'Topeng Mayat'	Teater Smanda	36	orang	108	12	26	560
3	Pementasan Teater 'Mata Sunyi'	Sanggar Kanti Becakap	27	orang	50	75	150	20
4	Pementasan Tari 'Dwi Na Nawasena'	Sendratasik UNJA	38	orang	75	10	125	0
5	Pementasan Teater 'Kabar Kepergian'	Teater TUR	23	orang	50	25	100	150
6	Workshop Teater	Taman Budaya Jambi	55	orang		50		
7	Pementasan 'Campur Sari'	Lokananta	32	orang	323			
8	Pementasan 'Wayang Kulit'	Whisnu Murti	22	orang	323			
9	Pementasan Teater 'Nata Sukma'	Studio Teater	23	orang	210	50	250	100
10	Lokakarya	Taman Budaya Jambi	55	orang		50		
11	Pergelaran Teater 'Keris Siginjai'	Sanggar Seni Rasi	53	orang	135	20		325
11	Workshop Musik	Taman Budaya Jambi	55	orang		50		

12	Workshop Sastra	Taman Budaya Jambi	55	orang		50		
13	Workshop Tari	Taman Budaya Jambi	55	orang		50		
14	Workshop Seni Rupa	Taman Budaya Jambi	55	orang		50		
15	Monolog 'Pada Waktunya' dan Peluncuran Buku 'Tarian Sang Aktor'	Taman Budaya Jambi	35	orang	100	150	50	
15	Pementasan Teater 'Sepatu Gila'	Teater Kuj	43	orang	200	40	400	
16	Pameran Apresiasi 'New Reborn'	Taman Budaya Jambi	30	orang	250	100	250	500
17	Pementasan Teater 'Ice Stage'	English Education Students Batch	98	orang	40		647	
18	Pementasan Tari 'Tapak Khadam dan Joget' Sekintang Dayo	Taman Budaya Jambi	50	orang	100	50	100	200
19	Pengolahan/ Eksperimentasi Seni	Taman Budaya Jambi	24	orang	100	50	100	200
20	Temu Karya Kab/ Kota	Taman Budaya Jambi	300	orang	1000	500	1000	500
21	Pameran Seni Rupa	Taman Budaya Jambi	150	orang	4900	500	500	500
22	Pementasan 'Suhay' Abdul Muluk Reborn	Taman Budaya Jambi	35	orang	200	30	100	100
23	Pementasan Teater 'Aduh' Teater TUR	Teater TUR	15	orang	50	10	50	70
24	Pementasan Tari 'Matruhala' Nakila	Sendratasik UNJA	23	orang	50		150	
25	Pementasan Musik 'Seloko In Musical'	Pelito Mudo Ethnic Project	25	orang	50	150	100	
26	Pementasan Teater 'Sepatu Gila' Teater Kuj	Teater Kuj	35	orang	150	50	100	300
27	Pementasan Musik 'Duowe Tamadun' ISI Surakarta	ISI Surakarta	43	orang	50	20	250	50

28	Pementasan Tari 'Bollywood Night #4' Taj Mahal Entertainment	Taman Budaya Jambi	35	orang	250		50	50
29	Pementtasan Tari	Sendratasik UNJA	35	orang	100	10	150	40
30	Pementasan Tari	Sendratasik UNJA	35	orang	100	10	150	40
31	Pementasan Tari 'Lambaian Kain Beruji'	Sendratasik UNJA	35	orang	100	10	150	40
32	Pementasan Tari 'Pembawa Lentera'	Sendratasik UNJA	35	orang	100	10	150	40
33	Jambi Cultural Fest	Asosiasi Kreografer Jambi	50	orang	500	250	250	50
34	Pameran Karya Budaya	Taman Budaya Jambi	60	orang	650	325	325	65
35	Pementasan Teater 'Naga Dari Selatan'	Salira Ayattushifa	15	orang	50	50		
36	Pementasan 'Monofolk'	Teater AiR	36	orang	100	100		1.100
37	Pementasan 'Lah Puar Jelupung Tumbuh XIII' Sekintang Dayo	Taman Budaya Jambi	55	orang	300	10	100	150
37	Festival Napak Dahin	Ilok Rupo Sungai Penuh	32	orang	120	30	50	
38	Tarikalisasi Puisi Jambi	Rasi	35		150	50	100	
39	Festival Seni Pertunjukan	Taman Budaya Jambi	2160		500	10	500	4.000
40	Pementasan Teater 'Diskusi Setan'	Teater AiR	35	orang	200	50	100	1.500
41	Pentas Budaya Danau Sipin 'Tuah Kerung Tanah Jajaran'	Komunitas Padasiran	50	orang	500	10	200	500
42	Pementasan 'Panggung Perempuan'	Taman Budaya Jambi	75	orang	200	50	100	50

5.2.3 Capaian Kinerja Indikator 3

Nilai dimensi warisan budaya mengukur capaian kinerja pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Nilai dimensi ini membantu

menjelaskan mengapa suatu warisan budaya layak dijaga—bukan hanya karena bentuknya, tetapi karena makna sejarah, sosial, dan budayanya. Juga menjadi dasar pelestarian dan perlindungan dimana nilai dimensi ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan perlindungan, konservasi, dan penetapan status warisan budaya seperti cagar budaya atau warisan budaya takbenda.

Indikator ini dicapai melalui:

1. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pemeliharaan makam Orang Kayo Hitam

2. Program Pembinaan Sejarah, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan:

- Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Penulisan sejarah lokal provinsi tentang nama pahlawan yang digunakan untuk nama jalan dalam Provinsi Jambi
- Peringatan pertempuran Simpang III Sipin

Faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja:

- Sinergitas antar lembaga dalam mendukung terlaksananya kegiatan terutama support finansial
- Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam penelitian penulisan sejarah

Faktor penghambat pencapaian target kinerja:

- Minimnya narasumber dalam proses verifikasi data sejarah
- Alokasi anggaran untuk kegiatan tidak tersedia sehingga kegiatan yang memerlukan keterlibatan tenaga ahli tidak dapat dilaksanakan

Solusi:

- Inventarisasi dan kompilasi data terkait kesejarahan diperoleh dari berbagai sumber ilmiah

3. Program Pengelolaan Permuseuman yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan:

- Pengelolaan Museum Provinsi.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah

1. Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
4. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah:

- Kajian koleksi (6 kali)
- Konservasi koleksi
- Reinventarisasi dan dokumentasi koleksi (10 jenis koleksi)
- Pemeliharaan tata pameran dan ruang simpan koleksi
- Belajar bersana di museum (8 kali)
- Dialog budaya (5 kali)
- Lomba-lomba edukatif kultural (21 kali)
- Workshop edukatif kultural museum (2 kali)
- Pameran temporer (4 kali)
- Pameran keliling (4 kali)
- Sosialisasi museum (3 kali)

- Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung museum

Faktor Pendorong Pencapaian Target Kinerja Museum

1. Komitmen dan Dukungan Pimpinan

Dukungan pimpinan dalam bentuk kebijakan, pengambilan keputusan strategis, serta pengalokasian sumber daya menjadi faktor utama dalam mendorong tercapainya target kinerja museum. Komitmen ini memberikan arah yang jelas bagi pengelola dalam melaksanakan program dan kegiatan permuseuman.

2. Ketersediaan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberadaan SDM yang memahami bidang permuseuman, termasuk pengelola koleksi, edukator, dan tenaga teknis, berperan penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif. +

3. Perencanaan Program yang Terarah dan Terukur

Perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan strategis serta indikator kinerja yang jelas membantu museum dalam mengarahkan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik memudahkan proses monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

4. Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana

Ketersediaan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang pameran, fasilitas penyimpanan koleksi, dan perangkat pendukung edukasi, menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program museum.

5. Sinergi dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas budaya, lembaga pendidikan, serta mitra lainnya mendorong optimalisasi pelaksanaan

program. Sinergi ini memperluas jangkauan layanan museum dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan koleksi, promosi, dan layanan publik, termasuk digitalisasi koleksi dan media informasi, membantu meningkatkan efisiensi kerja serta memperluas akses masyarakat terhadap museum.

7. Partisipasi dan Antusiasme Masyarakat

Tingginya minat dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan museum, seperti pameran, edukasi, dan program publik, menjadi pendorong capaian kinerja, khususnya dalam indikator jumlah pengunjung dan tingkat pemanfaatan museum.

8. Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan pengelola museum untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini dan melakukan penyesuaian strategi guna memastikan target kinerja tetap tercapai.

Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Museum

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Belum terpenuhinya fasilitas pendukung, seperti kebutuhan prasarana untuk keamanan dari kebakaran, instalasi listrik yang sudah sangat perlu diremajakan, ruang penyimpanan koleksi yang layak, laboratorium yang sudah harus diperbaiki, sarana edukasi, dan hal lainnya sehingga menghambat optimalisasi layanan museum.

2. Keterbatasan SDM Permuseuman

Masih terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang permuseuman, khususnya kurator, berdampak pada kualitas pengelolaan dan pengembangan museum dan juga semakin

berkurangnya kuantitas pegawai di museum disebabkan sudah ada yang purna bakti atau dipindahtugaskan.

3. Keterbatasan Anggaran

Alokasi anggaran yang belum sepenuhnya memadai khususnya APBD yang sangat minim membatasi pelaksanaan program pengembangan, perawatan koleksi, dan kegiatan publik museum.

4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Digitalisasi koleksi dan sistem informasi museum belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga akses informasi dan promosi museum masih terbatas.

5. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata

Minat kunjungan dan keterlibatan masyarakat terhadap museum masih bervariasi, terutama di luar kegiatan tertentu, sehingga memengaruhi capaian indikator pemanfaatan museum.

Solusi

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Museum

Mengusulkan pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana museum secara bertahap melalui perencanaan kebutuhan yang terukur, termasuk kebutuhan prasarana untuk keamanan dari kebakaran, instalasi listrik yang sudah sangat perlu diremajakan, perbaikan ruang pameran, laboratorium koleksi, ruang penyimpanan koleksi, serta fasilitas pendukung edukasi dan layanan publik.

2. Penguatan dan Pengembangan SDM Permuseuman

Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis permuseuman, bimbingan teknis, serta mendorong sertifikasi tenaga permuseuman, khususnya kurator, konservator, dan edukator museum, sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran

Menyusun perencanaan program yang lebih prioritatif dan berbasis kebutuhan riil museum, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia agar selaras dengan target kinerja dan indikator yang telah ditetapkan.

4. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi

Mendorong digitalisasi koleksi, pengembangan sistem informasi museum, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi dan edukasi untuk meningkatkan akses dan jangkauan layanan museum kepada masyarakat.

5. Penguatan Sinergi dan Kerja Sama

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas budaya, dan mitra strategis lainnya guna mendukung pelaksanaan kegiatan permuseuman dan perluasan partisipasi publik.

6. Peningkatan Program Edukasi dan Kegiatan Publik

Mengembangkan program edukasi yang inovatif dan berkelanjutan, seperti pameran tematik, kegiatan berbasis koleksi, dan program edukasi untuk pelajar dan masyarakat umum, guna meningkatkan minat kunjungan dan pemanfaatan museum.

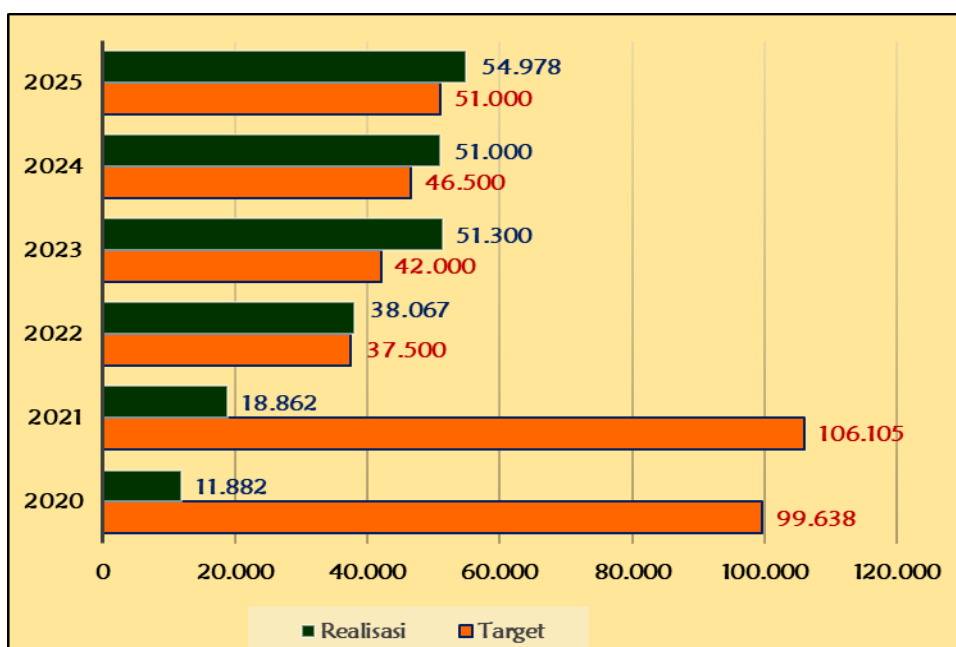
7. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan capaian indikator kinerja, sebagai dasar perbaikan kebijakan dan penyesuaian strategi pada periode selanjutnya.

Tabel 5.6 Jumlah Pengunjung Museum 2025

NO	BULAN	MUSEUM SIGINJEI	MPRJ	GENTALA ARASY
1	JANUARI	1.029	260	167
2	FEBRUARI	7.772	1.009	347
3	MARET	478	61	15
4	APRIL	818	444	557
5	MEI	1.840	629	190
6	JUNI	4.822	616	217
7	JULI	816	382	260
8	AGUSTUS	1.719	5.351	56
9	SEPTEMBER	9.820	839	142
10	OKTOBER	2.072	722	100

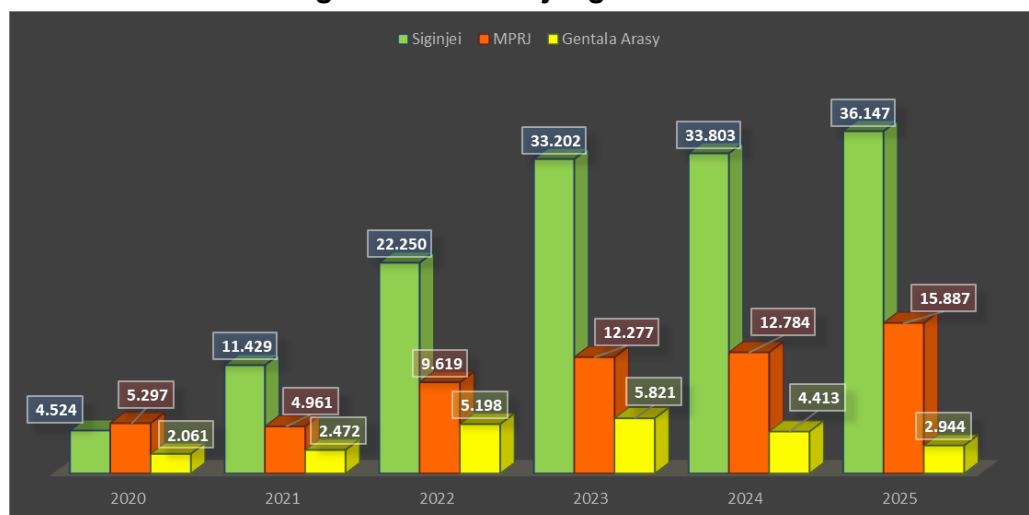
Grafik 5.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Museum Tahun 2020-2025



Pada tahun 2025 terjadi kenaikan jumlah pengunjung ke museum yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.978 orang (7,8%).

Program ini didukung Dana Alokasi Khusus Kementerian Kebudayaan RI untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan dan edukasi publik serta meningkatkan kualitas layanan.

Grafik 5.2. Perbandingan Jumlah Kunjungan Museum Tahun 2020-2025



Persentase capaian terhadap target (51.000) Museum Siginjei adalah sebesar 70,88%, Museum Perjuangan Rakyat Jambi sebesar 31,15% dan Museum Gentala Arasy sebesar 5,77%. Persentase capaian terhadap realisasi kinerja (54.978), jumlah pengunjung Museum Siginjei adalah 36.147 orang (65,75%), pengunjung Museum Perjuangan Rakyat Jambi adalah sebesar 15.887 orang (28,90%) dan jumlah pengunjung Museum Gentala Arasy sebesar 2.944 orang (5,35%). Jumlah pengunjung tertinggi di Museum Siginjei dikarenakan menjadi lokasi sebagian besar kegiatan. Juga karena museum ini memiliki jumlah koleksi terbanyak dan sarana prasarana yang lebih memadai dari MPRJ dan Gentala Arasy.

Berikut capaian kinerja program kegiatan pendukung indikator ini.

Tabel 5.7 Capaian Kinerja Indikator 3

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya pelestarian budaya dan nilai tambah sektor pariwisata	Nilai Dimensi Warisan Budaya	55,25	57,02	103,2
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya teregristrasi	120 objek	115	95,8
3.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	120 objek	115	95,8
3.1.1	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	4 objek	1	25
3.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat	Jumlah Tenaga Ahli Bagar Budaya Tingkat Provinsi Jambi	7 orang	7	100
3.2.1	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	5 cagar budaya	1	20
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah SDM dan lembaga sejarah yang terlibat dalam kegiatan	40 orang	30	75
4.1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah sejarah yang terdokumentasikan	1 dokumen	1	100
4.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	40 orang	30	75

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	22 persen	23,72	108
5.1	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah kunjungan museum	51.000 orang	54.978	108
5.1.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	755 unit	780	103
5.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah SDM permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	13 orang	13	13
5.1.3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	3 Unit	3	100
5.1.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia	3 unit	3	100

5.2.4 Capaian Indikator 4

Sasaran Meningkatnya pelestarian budaya dan nilai tambah sektor pariwisata dengan Indikator Pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum dicapai melalui:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Penyusunan data jumlah daya tarik wisata di kab/kota provinsi Jambi sebanyak 307 DTW
2. Penyusunan data desa wisata sebanyak 77 desa, dan kawasan pariwisata sebanyak 6 kawasan
3. Dana Hibah kepada Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi berupa pembayaran iuran keanggotaan UNESCO, dan biaya operasional BP Geopark.
4. Pembuatan jalan setapak rabat beton sepanjang 5000 meter di Taman Rimbo Wisata Al Innayah Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
5. Pelatihan Pengembangan Digital Desa Wisata di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 38 orang yang terdiri dari Kepala Desa, pengelola desa wisata, pengelola daya tarik wisata, dan pelaku pariwisata.
6. Pelatihan Pemberdayaan SDM Pengelola Desa Wisata Penyangga Candi Muaro Jambi sebanyak 30 orang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala desa di 8 desa penyangga Candi Muaro Jambi, pemuda penggerak pariwisata.
7. Sosialisasi Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata sebanyak 40 pelaku industri pariwisata yang belum mempunyai izin usaha.
8. Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha sebanyak 20 pelaku usaha pariwisata yang sudah difasilitasi pendampingan penerbitan izin usaha yang ada di Provinsi Jambi.

Faktor pendorong dalam pencapaian target:

- Adanya penyusunan program/kegiatan yang terstruktur, selaras dengan sasaran strategis dan dukungan perencanaan yang baik.
- Potensi alam, buatan, dan budaya menjadi daya tarik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan.
- Adanya fasilitasi dan koordinasi dalam menunjang program kegiatan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja:

- Adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program/kegiatan, kompetensi SDM pariwisata yang belum memadai dan belum optimalnya kolaborasi lintas sektor

Solusi:

Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait penyediaan data dan pembinaan SDM masyarakat sekitar destinasi wisata.

2. Program Pemasaran Pariwisata Pariwisata yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan:

- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pelaksanaan Festival Batanghari yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi
- Pelaksanaan Festival Hadroh dalam rangka HUT Provinsi Jambi
- Pendukung Festival Budaya Kerinci
- Festival Pangkalan Jambu
- Pendukung Kerinci Highland Trail Run
- Penyediaan data informasi kepariwisataan digital
- Siaran Paket Pesona Indonesia Berkelanjutan

- MoU Nomor: MoU-01/Disbudpar-5/II/2025 tentang Kesepakatan Bersama Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dan Pemandu Wisata Minat Khusus di Wilayah Kabupaten Kerinci

Tabel 5.8 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Kerinci	775
2.	Kabupaten Merangin	12
3.	Kabupaten Sarolangun	3
4.	Kabupaten Batanghari	0
5.	Kabupaten Muaro Jambi	114
6.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0
8.	Kabupaten Tebo	0
9.	Kabupaten Bungo	0
10.	Kota Jambi	12.418
11.	Kota Sungai Penuh	262
J u m l a h		13.584

Tabel 5.9 Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Kerinci	76.5028
2.	Kabupaten Merangin	544.096
3.	Kabupaten Sarolangun	136.153
4.	Kabupaten Batang Hari	187.592
5.	Kabupaten Muaro Jambi	87.811

6.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	41.542
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	454.393
8.	Kabupaten Tebo	338.932
9.	Kabupaten Bungo	1.384.001
10.	Kota Jambi	1.267.732
11.	Kota Sungai Penuh	174.861
J u m l a h		5.382.141

Tabel 5.10 Jumlah Wisatawan Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Kerinci	765.803
2.	Kabupaten Merangin	544.108
3.	Kabupaten Sarolangun	136.156
4.	Kabupaten Batang Hari	187.592
5.	Kabupaten Muaro Jambi	87.925
6.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	41.542
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	454.393
8.	Kabupaten Tebo	338.932
9.	Kabupaten Bungo	1384001
10.	Kota Jambi	1.280.150
11.	Kota Sungai Penuh	175.123
J u m l a h		5.395.725

Pada tahun 2025 jumlah pergerakan wisatawan nusantara adalah sebesar 5.382.141 pergerakan. Dibandingkan dengan tahun 2024, mengalami kenaikan 6,44% yaitu sebesar 5.056.717. Sebaran wisatawan terbesar masih di Kota Jambi (23,73%) sebagai pintu gerbang kedatangan wisatawan,

Kabupaten Bungo (25,65%) dan Kabupaten Kerinci (14,19%).

Faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja:

- Transparansi pembelanjaan melalui marketplace
- Digitalisasi data kebudayaan dan pariwisata
- Sudah adanya perjanjian kerjasama antara Disbudpar Provinsi Jambi dan TVRI Jambi

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja:

- Perubahan jadwal yang dapat mengganggu efektivitas promosi pemasaran dan menyebabkan ketidaksesuaian informasi promosi di media sosial atau kalender event, karena wisatawan membutuhkan kepastian untuk merencanakan perjalanan. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan dan minat kunjungan, meskipun event tetap menjadi alat promosi kuat jika dikelola dengan baik.
- Akses atau sarana transportasi yang tidak memadai pada event pariwisata dapat menghambat efektivitas promosi pemasaran, karena wisatawan cenderung menghindari destinasi sulit dijangkau meskipun dipromosikan secara masif. Hal ini menurunkan minat kunjungan dan reputasi event.
- Proses perizinan yang terhambat berdampak negatif besar terhadap kesuksesan dan promosi event dengan menyebabkan keterlambatan, biaya tambahan, serta risiko pembubaran. Perizinan lambat menyebabkan penundaan persiapan, sehingga event sulit dilaksanakan tepat waktu atau bahkan dibatalkan, merugikan finansial dan reputasi penyelenggara. Hambatan perizinan juga menurunkan kredibilitas, membuat mitra enggan berkolaborasi karena khawatir risiko hukum dan ketidakpastian.
- Kurangnya tenaga IT dalam perencanaan dan pelaksanaan event.

Solusi:

- Upaya yang dilakukan adalah koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder dalam menyusun perencanaan event. Jadwal event dibuat dengan merata sepanjang tahun dengan menghindari penumpukan diakhir tahun atau semester kedua untuk mencegah konflik jadwal dan meningkatkan kunjungan wisatawan secara merata. Membuat komitmen bersama untuk tidak mengubah jadwal event dengan mendadak.
 - Terkait sarana transportasi menuju venue event, dilakukan koordinasi dengan kabupaten/kota setempat untuk memfasilitasi transportasi bagi masyarakat.
 - Kurangnya tenaga IT diantisipasi dengan melibatkan peserta magang dan komunitas untuk membantu membuat dan mengelola bahan promosi untuk media sosial.
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan:
- Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan:
- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada kedua program ini adalah:

- Workshop Pertumbuhan PDRB Pelaku Ekonomi Kreatif
- Workshop Pengembangan Desain Animasi Ekonomi Kreatif
- Penyusunan buku Data Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2025

- Pendukungan pemasaran ekonomi kreatif pada Festival Batanghari 2025
- Fasilitasi 20 sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja:

- Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait ekonomi kreatif dan perlindungan HKI serta regulasi yang jelas meningkatkan kepastian hukum dan mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan karya atau produknya.
- Digitalisasi layanan HKI, sistem pendaftaran online yang lebih cepat dan transparan.
- Penggunaan media sosial dan marketplace untuk promosi produk kreatif

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja:

- Kurangnya koordinasi antar sektoral, keterbatasan dana operasional, dan minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap perlindungan HKI. Program ini juga menghadapi masalah keterbatasan SDM pendamping, birokrasi rumit dalam pendaftaran, akses permodalan sulit, dan infrastruktur pendukung kurang. Kurangnya pelatihan, investor, dan event marketing juga menjadi hambatan, sehingga sektor kreatif sulit bersaing secara berkelanjutan. Masih banyak UMKM kreatif belum memanfaatkan teknologi informasi di era digital. Juga belum adanya perda inisiatif untuk pengelolaan HKI daerah.
- Kualitas dan kompetensi pelaku ekonomi kreatif yang belum merata, banyak pelaku ekonomi kreatif memiliki kemampuan produksi namun lemah dalam manajemen usaha dan strategi pemasaran dan belum memahami digital marketing dan kurang menguasai marketplace dan e-commerce, data pelaku ekonomi kreatif belum terintegrasi.

Solusi:

- Melakukan pendataan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengetahui potensi, kebutuhan pelatihan, dan permasalahan yang

dihadapi sehingga program tepat sasaran. Mengaktifkan komunitas ekonomi kreatif sebagai motor penggerak kegiatan pembinaan dan promosi secara partisipatif.

- Pendataan dan pemetaan potensi lokal dengan menggunakan data yang sudah ada untuk memetakan sub sektor unggulan guna mengidentifikasi produk yang berpotensi didaftarkan, sosialisasi HKI melalui komunitas ekonomi kreatif dan mendorong pemanfaatan platform digital untuk branding produk. Memfasilitasi pemasaran produk kreatif lokal pada event promosi

Rincian capaian kinerja program kegiatan pendukung indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11 Capaian Realisasi Indikator 4

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
II	Meningkatnya pelestarian budaya dan nilai tambah sektor pariwisata	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum	1 %	1,08	108
6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan	19 persen	19	100
6.1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	-	-
6.1.1	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan	1 unit	1	100

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	strategis pariwisata provinsi			
6.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah peserta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan strategis pariwisata provinsi	60 peserta	60	100
6.2	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah industri pariwisata yang terdaftar dalam TDUP	50 industri	50	100
6.2.1	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	1 laporan	1	100
6.2.2	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah unit usaha pariwisata yang memperoleh standarisasi dan sertifikasi	50 unit usaha	50	100
7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	20 persen	14,29	71,45

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
7.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah pelaksanaan event	7 dokumen	5	71,43
7.1.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	7 dokumen	7	100
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	22 persen	22	100
8.1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi	Jumlah dokumen analisa ekonomi kreatif	1 dokumen	1	100
8.1.1	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekraf, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekraf	1 dokumen	1	100
8.1.2	Pendukung Pemasaran Ekonomi	Jumlah fasilitasi dan supporting pemasaran ekonomi kreatif	1 kegiatan	1	100

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	22 persen	18,86	85,7
9.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah fasilitasi standarisasi kompetensi profesi	70 orang	62	88,6
9.1.1	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	70 orang	62	88,6
9.2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitasi manajemen pemasaran bagi pelaku ekraf	20 orang	20	100
9.2.1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	20 orang	20	100

5.3 Realisasi Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan

Penyerapan anggaran Belanja Total pada tahun 2025 sebesar Rp 28.508.033.854,- (95,95%) dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp 29.711.204.953,-. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan Urusan Wajib dari target Rp 27.266.736.024,- terealisasi Rp. 26.242.728.060,- (96,24%) sedangkan realisasi untuk program/kegiatan Urusan Pilihan target sebesar Rp 2.444.468.929,-

dengan realisasi sebesar Rp. 2.265.305.794,- (92,67%). Adapun rincian anggaran yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Realisasi APBD Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 14.615.178.201,- (96,96%).
2. Realisasi APBD Belanja Langsung sebesar Rp. 13.829.902.445,- (94,48%).
3. Realisasi APBN DAK sebesar Rp. 5.683.372.718,- (98,79%)

Atau dapat dikategorikan realisasi rincian Belanja Operasi Sebesar Rp. 28.217.507.779,- (93,16%) dengan uraian realisasi Belanja Pegawai **Rp 13.829.902.445,- (94,48%)**, realisasi **Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 11.910.525.334,- (96,71%)** dan realisasi **Belanja Hibah sebesar Rp 2.477.080.000,- (100%)** serta untuk kategori Belanja Modal, realisasinya adalah sebesar Rp 290.526.075,- (92,25).

Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Belanja Langsung APBD untuk program utama sebesar Rp. 26.242.728.060,- (96,24%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp. 27.266.736.024,-
2. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp 2.037.291.204 (91,86%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 2.217.825.214,-
3. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.615.178.201,- (96,96%). dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 15.108.342.065,- .

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 masih mencukupi.

Anggaran dan realisasi Belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pelestarian budaya dan nilai tambah sektor pariwisata	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	44,30	25,49	57,54	3.137.155.680	3.131.155.680	99,81
	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	33,23	35,08	105,57	2.150.000.000	2.072.000.000	96,37
	Nilai Dimensi Warisan Budaya	55,25	57,02	103,2	3.911.761.168	3.848.793.638	98,39
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum	1%	1,08%	108	2.444.468.929	2.265.305.794	92,67
Jumlah					29.396.286.653	28.217.507.779	95,99

5.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan fokus pada upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Utama. Analisis efisiensi ini dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran}}{\text{Persentase Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

dengan interpretasi:

< 100% → Efisien (anggaran lebih kecil dibanding capaian kinerja)

= 100% → Seimbang

> 100% → Kurang efisien

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.13 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi 8/5 X 100%
1	2	5	6	7	8	9
Meningkatnya pelestarian budaya dan nilai tambah sektor pariwisata	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	57,54	3.137.155.680	3.131.155.680	99,81	173,46
	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	105,57	2.150.000.000	2.072.000.000	96,37	91,29
	Nilai Dimensi Warisan Budaya	103,2	3.911.761.168	3.848.793.638	98,39	95,34
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum	108	2.444.468.929	2.265.305.794	92,67	85,81

Analisis Efisiensi

Indikator sasaran Nilai Dimensi Ekonomi Budaya termasuk kategori kurang efisien. Kondisi ini tidak hanya disebabkan satu hal saja melainkan kombinasi beberapa faktor. Target yang ditetapkan berada diatas rata-rata nasional dimana yang menjadi indikator adalah persentase pendukung pertunjukan seni budaya yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan. Kurangnya efisiensi juga disebabkan oleh belum optimalnya orientasi program terhadap peningkatan pendapatan pelaku seni budaya, rendahnya porsi anggaran yang langsung menyentuh pelaku, lemahnya akses pasar dan komersialisasi, serta indikator kinerja yang belum sepenuhnya mencerminkan outcome ekonomi. Selain itu, keterbatasan kapasitas pelaku seni dan belum berkelanjutannya program juga menyebabkan aktivitas yang dilaksanakan belum mampu meningkatkan penghasilan secara signifikan.

Nilai efisiensi indikator Nilai Dimensi Ekspresi Budaya sebesar 85,81 pada dasarnya menunjukkan kinerja yang cukup efisien (mendekati sangat efisien)—artinya sebagian besar anggaran yang digunakan telah mampu dikonversi menjadi capaian kinerja, meskipun masih ada sedikit ruang perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada dimensi ekspresi budaya telah berjalan relatif optimal, di mana penggunaan anggaran cukup sebanding dengan capaian kinerja yang dihasilkan dan mencerminkan bahwa sebagian besar sumber daya yang dialokasikan telah memberikan output yang signifikan dalam mendukung pengembangan dan pelestarian ekspresi budaya.

Efisiensi indikator Nilai Dimensi Warisan Budaya sebesar 95,34%, tercermin dari tercapainya target kinerja secara optimal dengan penggunaan anggaran yang proporsional. Hal ini didukung oleh perencanaan yang tepat sasaran, pelaksanaan kegiatan yang cukup efektif, pemanfaatan teknologi, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga output dan outcome yang dihasilkan dapat maksimal dengan biaya yang efisien.

Pengukuran efisiensi indikator sasaran Pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum berasal dari 4 (empat) program bidang pariwisata dimana diperoleh nilai efisiensi sebesar 85,81%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan empat program ini tergolong efisien, karena realisasi anggaran hanya mencapai 92,67%, sementara capaian kinerja mencapai 108% dari target. Efisiensi tersebut disebabkan oleh optimalisasi partisipasi berbagai pihak pada event promosi, peran serta pemerintah daerah dan antusias masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif dalam pendukungan pelatihan pemberdayaan SDM.

BAB V PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 secara lebih terinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan akan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan Laporan Keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Terima kasih kami tidak lupa disampaikan kepada segenap jajaran pegawai lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Jambi, Januari 2026

KEPALA DINAS,

H. IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19710510 199703 1 008

LAMPIRAN

Lampiran 1

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TA 2025

No	Nama Barang	Merk/Type	Asal usul	Bahan	Harga (Rp)
1.	Mesin Pompa Air	Shimizu	Pembelian	Logam	1.800.000
2.	AC	LG	Pembelian	Besi	11.196.000
3.	Meja 1/2 Biro	Orbitren	Pembelian	Kayu	2.300.000
4.	Mesin Potong Rumput	Tanaka	Pembelian	Besi	7.600.000
5.	Meja 1/2 Biro	-	Pembelian	Kayu	7.600.000
6.	Sofa Tamu	-	Pembelian	Busa	4.050.000
7.	CCTV	-	Pembelian	Besi	18.012.800
8.	AC Standing	-	Pembelian	Besi	40.950.000
9.	Laptop	-	Pembelian	Logam	40.657.500
	Total				134.166.300

Lampiran 2

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TA 2025

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Konstruksi Bangunan		Lokasi	Harga (Rp)
		Bartingkat / tidak	Beton / Tidak		
1.	Rehab Gedung Taman Budaya Jambi	Tidak	Beton	Taman Budaya Jambi	156.359.775
	Total				156.359.775

Lampiran 3

REKAPITULASI BELANJA MODAL BARANG MILIK DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

No	Kode Golongan	Kode Bidang barang	Nama Bidang Barang	Jumlah 31 Desember 2025	
				Barang	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	01	01	TANAH		
2	02		PERALATAN DAN MESIN		134.166.300
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	155.759.775
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	0
5	05		ASET TETAP LAINNYA	-	0
6	06	20	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	-	0
7	07	21	ASET LAINNYA	-	0
J U M L A H				-	289.926.075

Lampiran 4

Pemerintah Provinsi Jambi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Register STS
01 Januari 2025 – 31 Desember 2025

No	Tanggal STS	Nomor STS	Unit SKPD	Nama Penyetor	Keterangan	Jenis STS	Nilai (Rp)
1	09 April 2025	15.00/07.0/000001/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/M/4/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 0,-	TU	Rp0,00
2	06 Mei 2025	15.00/07.0/000003/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 0,-	TU	Rp0,00
3	06 Mei 2025	15.00/07.0/000002/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 0,-	TU	Rp0,00
4	09 Mei 2025	15.00/07.0/000009/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	TU	Rp0,00
5	02 Juni 2025	15.00/07.0/000006/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TU	Rp20.800,00
6	10 Juni 2025	15.00/07.0/000007/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN	STS TU Sub Keg. Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian	TU	Rp426.000,00

				DAN PARIWISATA	Tradisional		
7	10 Juni 2025	15.00/07.0/000008/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	TU	Rp462.000,00
8	07 Juli 2025	15.00/07.0/000011/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/7/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	TU	Rp223.162,00
9	09 Juli 2025	15.00/07.0/000013/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/7/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	TU	Rp797.597,00
10	09 Juli 2025	15.00/07.0/000012/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/7/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	TU	Rp3.765.849,00
11	30 Juli 2025	15.00/07.0/000014/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/8/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	TU	Rp0,00
12	01 Agustus 2025	15.00/07.0/000021/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/9/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	TU	Rp0,00

13	05 Agustus 2025	15.00/07.0/000016/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/9/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TU	Rp0,00
14	31 Agustus 2025	15.00/07.0/000015/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/9/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Pelindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	TU	Rp0,00
15	19 September 2025	15.00/07.0/000019/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/9/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri	TU	Rp2.140.000,00
16	19 September 2025	15.00/07.0/000017/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/9/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Peningkatan Pelayanan Dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	TU	Rp1.194.027,00
17	22 September 2025	15.00/07.0/000020/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/9/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	TU	Rp3.889.600,00
18	01 Oktober 2025	15.00/07.0/000022/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/10/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penyediaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Museum	TU	Rp0,00
19	31 Oktober 2025	15.00/07.0/000025/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN	STS TU Sub Keg. Peningkatan Pelayanan Dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	TU	Rp0,00

				PARIWISATA			
20	31 Oktober 2025	15.00/07.0/000024/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Pelindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	TU	Rp0,00
21	03 November 2025	15.00/07.0/000023/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/P2/11/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	TU	Rp0,00
22	10 November 2025	15.00/07.0/000026/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	TU	Rp0,00
23	21 November 2025	15.00/07.0/000027/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri	TU	Rp14.000,00
24	15 Desember 2025	15.00/07.0/000032/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	TU	Rp0,00
25	15 Desember 2025	15.00/07.0/000033/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	TU	Rp0,00
26	18 Desember 2025	15.00/07.0/000031/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	TU	Rp0,00

27	18 Desember 2025	15.00/07.0/000029/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	TU	Rp0,00
28	19 Desember 2025	15.00/07.0/000028/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TU	Rp19.540.000,00
29	23 Desember 2025	15.00/07.0/000035/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	TU	Rp5.946.482,00
30	23 Desember 2025	15.00/07.0/000038/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	TU	Rp0,00
31	24 Desember 2025	15.00/07.0/000037/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	TU	Rp1.761.600,00
32	24 Desember 2025	15.00/07.0/000045/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TU	Rp0,00
33	24 Desember 2025	15.00/07.0/000039/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 0,-	TU	Rp0,00

34	24 Desember 2025	15.00/07.0/000036/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Pelindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	TU	Rp820.880,00
35	26 Desember 2025	15.00/07.0/000041/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	TU	Rp396.000,00
36	26 Desember 2025	15.00/07.0/000040/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	TU	Rp2.194.208,00
37	29 Desember 2025	15.00/07.0/000046/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub. Keg. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	TU	Rp8.212.980,00
38	29 Desember 2025	15.00/07.0/000043/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	TU	Rp3.164.460,00
39	29 Desember 2025	15.00/07.0/000044/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	TU	Rp260.200,00
40	30 Desember 2025	15.00/07.0/000048/TU/2.22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	TU	Rp7.764.828,00

41	30 Desember 2025	15.00/07.0/000047/TU/2. 22.3.26.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	STS TU Sub Keg. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	TU	Rp7.722.200,0 0
42	30 Desember 2025	15.00/06.0/000001/UP- NIHIL/2.22.3.26.0.00.01.00 00 /PPR1/12/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Setoran UYHD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025	UP	Rp11.924.255,0 0
Total							Rp. 82.641.148